

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama : HENNI PUTRI SIREGAR**  
**Npm : 1705180026**  
**Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : HENNI PUTRI SIREGAR  
NPM : 1705180026  
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBLAKAKAN DANA DESA PADA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B+) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

**Penguji II**

HASTINA FEBRIYANTI, SE, M.Si

**Pembimbing**

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, M.Si

**Ketua**

**Panitia Ujian**

**Sekretaris**

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (0601) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HENNI PUTRI SIRIGAR  
N.P.M : 1705180026  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI R.S., SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI R.S., SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. JANURI S., MM, M.Si

## *Teruntuk Kedua Orangtuaku*

### *Bapak dan (Almh) Mama*

*Terimakasih untuk kasih sayang yang telah diberikan kepada putrimu ini hingga bisa mencapai gelar sarjana, maafkan aku karena di sisa hidup mamak belum bisa membanggakan mamak dan maafkan aku yang sering mengecewakan bapak. Untuk mamak yang disana aku yakin mamak sudah bahagia disana dan bangga melihatku sudah mencapai gelar sarjana. Dan untuk bapak terimakasih sudah berjuang sangat jauh kepadaku sampai saat ini dan semoga sehat selalu , aku berharap bapak selalu dalam lindungan Allah Swt.*

*Maafkan aku yang selalu membantah perkataan bapak dan mamak tidak memberikan nasihat yang diberikan kepadaku. Aku selalu berdoa untuk mamak agar selalu bahagia disana dan begitu juga dengan bapak.*

*Hargai dan sayangi apa yang kita punya saat ini dengan sepenuh hati, karena kita tidak tau kapan orang yang kita sayang akan meninggalkan kita.*

## ABSTRAK

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara” topik ini diangkat berdasarkan Fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan Badan Pusat Statistik bahwasanya tidak meratanya pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan sehingga tidak meratanya tingkat kualitas hidup yang terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel JPD, JSFS,JSFKES, JD, TK dan IPD dalam mempengaruhi Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara dan melakukan analisa ekonomi mengenai indikator potensi sosial ekonomi dan dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* adalah seluruh kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara sedangkan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan 2018. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi berganda menggunakan *software E-Views 10*. Hasil estimasi pertama yaitu pengaruh JPD (jumlah penduduk desa) , JSFS (jumlah sarana fisik sekolah),JSFKES (jumlah sarana fisik kesehatan), JD (jumlah desa), TK (tingkat kemiskinan) dan IPD (indeks pembangunan desa) sebesar 42,52%, sedangkan sisanya 57,48 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*. Secara parsial, variabel JD (jumlah desa) berpengaruh kuat dan signifikan terhadap Dana Desa (DD) dengan P value dari t parsial IPM adalah 0,00001 dengan taraf signifikan 1% dibanding variable lain. Dalam model regresi pada data panel dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*, dari hasil uji *Random Effect* Model maka di peroleh nilai *cross-section* random sebesar 0.000, nilai *probability* < 0,05, maka model yang dipilih adalah *random effect*

**Kata Kunci** : DD, JPD, Jumlah Sarana Fisik Sekolah, JUmlah Sarana Fisik Kesehatan, Jumlah Desa, Tingkat Kemiskinan, IPD

## KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara”, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Ayahanda Bahari Siregar, SH dan Alm Ibunda Dra. Chaerani Daulay yang telah memberikan do'a, spiritual, moral, dan materil yang tidak akan ternilai. Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Keluarga Kecil ( Bang Arsad, Bang Asrul dan Kak Yanti) yang telah memberi support dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Untuk Zulfikri Nasution yang selalu membantu, mendukung dalam hal apapun saya mengucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada seluruh teman jurusan saya yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman terbaik saya Ade Shandra dan Ketry yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini

10. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU dari angkatan 2017 – 2020

11. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2021  
Penulis,

**Henni Putri Siregar**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	26
1.3 Batasan Masalah .....	27
1.4 Rumusan Masalah.....	27
1.5 Tujuan Penelitian .....	28
1.6 Manfaat Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
2.1 Landasan Teori.....	30
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	30
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional .....	49
2.1.3 Pengeluaran Negara .....	52
2.1.4 Kemiskinan .....	56
2.2 Regulasi Pemerintah .....	58
2.2.1 Otonomi Daerah.....	58
2.2.2 Desentralisasi Fiskal .....	58
2.2.3 Kebijakan Dana Desa.....	60
2.3 Penelitian Terdahulu .....	65

2.4 Kerangka Analisis Penelitian .....	66
2.5 Kerangka Model Estimasi .....	66
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	67
3.2 Definisi Operasional .....	68
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	69
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	69
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.6 Model Estimasi .....	70
3.7 Metode Estimasi .....	71
3.8 Teknik Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara .....	81
4.1.1 Letak Geografis .....	84
4.1.2 Kondisi Iklim Dan Topografi .....	84
4.1.3 Kondisi Demografi .....	86
4.1.4 Kondisi Ekonomi .....	89
4.1.5 Kondisi Sosial Provinsi Sumatera Utara .....	94
4.2 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan .....	96
4.2.1 Letak Geografis .....	96
4.2.2 Kondisi Iklim Dan Topografi .....	100
4.2.3 Kondisi Demografi .....	102
4.2.4 Kondisi Ekonomi .....	102
4.2.5 Kondisi Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan .....	107

4.3 Analisa Model Estimasi Tentang Dana Desa.....	108
4.3.1 Perkembangan Dana Desa .....	108
4.3.2 Statistik Deskriptif .....	111
4.3.3 Hasil Analisis Regresi .....	112
4.3.4 Penaksiran .....	113
4.3.5 Interpretasi Hasil .....	114
4.3.6 Konstanta Dan Interpretasi.....	115
4.3.7 Uji Statistik .....	118
4.3.8 Asumsi Klasik .....	118
4.4 Potensi Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan.....	121
4.4.1 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto .....	121
4.4.2 Tenaga Kerja .....	124
4.4.3 Perkembangan Dana Desa .....	125
4.5 Perkembangan Potensi Sosial Ekonomi Kec.Sipirok .....	125
4.5.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	126
4.5.2 Potensi Ekonomi Dan Sosial Desa Paranjulu, Desa Paranpadang, Desa Sarogodung, Desa Marsada .....	126
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>132</b>
5.1 Kesimpulan .....	132
5.2 Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>138</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019–Maret 2020 .....	13
Tabel 1.4	APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 .....	21
Tabel 1.5	Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Utara .....	22
Tabel 1.6	Produk Regional Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Lap.Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 .....	24
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	57
Tabel 3.1	Definisi Operasional .....	67
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2020.....	82
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 .....	85
Tabel 4.3	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020 .....	87
Tabel 4.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara, 2019.....	90
Tabel 4.5	Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Dan Atas Dasar Harga Berlaku .....	91
Tabel 4.6	Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan Kabupaten Tapanuli Selatan .....	97

Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Selatan .....	99
Tabel 4.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan 2015 - 2019 .....	102
Tabel 4.9	PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2015-2019 .....	105
Tabel 4.10	Laju Inflasi Kumulatif Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015-2019.....	105
Tabel 4.11	Rincian Dana Desa Per Kabupaten Se-Sumatera Utara.....	108
Tabel 4.12	Deskriptif .....	111
Tabel 4.13	Hasil Pengolahan Data Model Estimasi.....	112
Tabel 4.14	PDRB Nilai Dan Kontribusi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 Dan 2019 ...	75
Tabel 4.15	Kontribusi Tenaga Kerja Per Sektor Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2019 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 – 2020 .....	6
Gambar 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2015–2020 .....	8
Gambar 1.3	Perkembangan Gini Ratio Indonesia Maret 2015 - Maret 2020	9
Gambar 1.4	Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Pulau, 2018 .....	10
Gambar 1.5	Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IDM .....	11
Gambar 1.6	Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.....	17
Gambar 1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, 2015-2020 .....	18
Gambar 1.8	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Sumatera Utara, Maret 2015 – Maret 2020 .....	18
Gambar 2.1	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	56
Gambar 2.2	Kerangka Analisis Penelitian.....	65
Gambar 3.1	Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis.....	74
Gambar 3.2	Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis.....	75
Gambar 4.1	Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara, September 2012 - Maret 2019.....	94
Gambar 4.2	Peta Kabupaten Tapanuli Selatan .....	96
Gambar 4.3	Scatterplot Model .....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (*rural area*) maupun daerah perkotaan (*urban area*). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota -desa, masalah ketenaga-kerjaan, masalah lingkungan hidup. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Selama ini wilayah perbatasan identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan.

Terdapat dua pengertian wilayah perbatasan dalam konteks pembangunan Nasional di Indonesia. Dalam konteks Negara, wilayah perbatasan melingkupi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara tetangga, sedangkan dalam tulisan ini wilayah perbatasan lebih diartikan sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi tertentu yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain di sekitarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua tipe wilayah perbatasan tersebut merupakan

bagian integral pelaksanaan pembangunan Nasional Negara Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan Nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional meliputi pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan daerah harus merata di seluruh wilayah dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara umum pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk: (a) Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (b) Memperkokoh kesatuan ekonomi Nasional, serta (c) Memelihara efisiensi pertumbuhan Nasional.



Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di KTI. Hal tersebut sudah tercantum sejak masih diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna, pada tiap tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa daerah yang telah berkembang menjadi pusat pelayanan (misalnya daerah perkotaan), akan menyerap lebih banyak investasi dan intervensi pembangunan. Pertumbuhan suatu wilayah akan saling terkait dengan perkembangan fasilitas pelayanan, disebabkan pertumbuhan wilayah membutuhkan dukungan pengadaan dan perluasan pelayanan. Ketersediaan pelayanan di suatu wilayah tersebut pada gilirannya akan menstimulir pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pembangunan wilayah berjalan bersama-sama dengan perwujudan pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah lainnya.

Realita pembangunan ekonomi Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka posisinya Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang (*development country* atau *DCs*). Sebagai negara berkembang,

Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, bila melihat secara umum, potensi sumber alam negeri ini yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan sebagai negeri yang kaya raya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masih jauh dibawah negara-negara maju. Indonesia juga banyak memiliki potensi ekonomi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam Deininger & Pedro, (2000).

Pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu dalam Todaro & Smith, (2011).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang

dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. (Todaro & Smith, 2011).

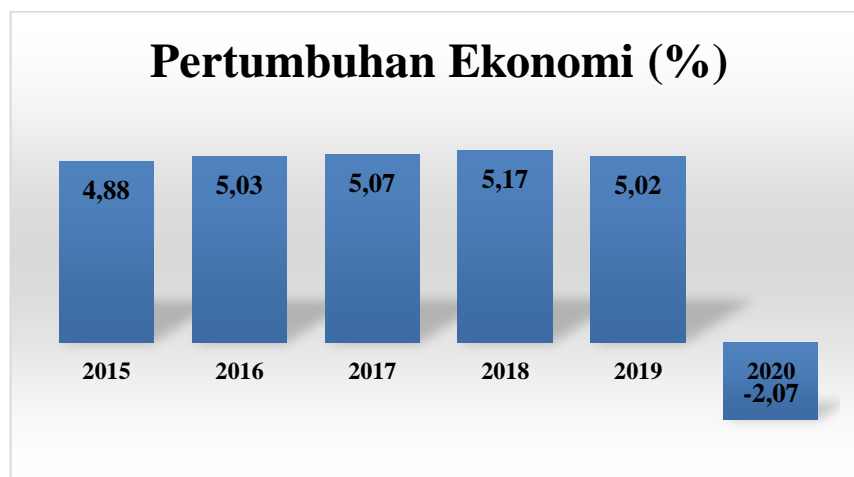
Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Negara dapat dikatakan sejahtera jika output perkapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB per kapita terus meningkat maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi ialah perubahan pendapatan nasional riil. Negara yang dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riilnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Karena pertumbuhan

ekonomi bisa saja dikatakan pertumbuhan yang semu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Masalah kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masalah tersebut belum menunjukkan tanda – tanda menghilang. Angka statistik terus memberikan informasi masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Suliswanto, 2010).

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 – 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Dapat dilihat dari gambar di atas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia pertumbuhannya mengalami peningkatan hanya sedikit. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 4.88%, tahun 2016 5,03%, tahun 2017 5,07%, dan tahun 2018 5,17%. Di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,02%, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drasis yaitu sebesar -2,07%.

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang

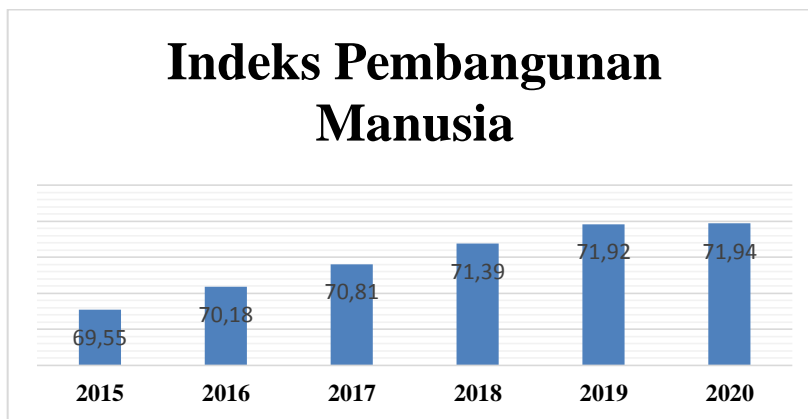
utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas – fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. (Ginting, Lubis, & Mahalli, 2008).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam IPM terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata- rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata – rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan

menjadi paritas daya beli. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat.

**Gambar 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2015–2020**



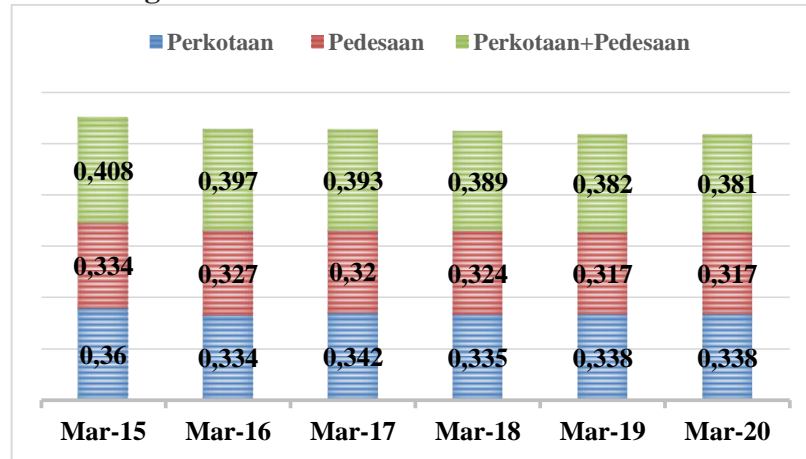
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

IPM Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 71,92 pada tahun 2019. IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2016. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Indonesia. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2015–2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan

mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. (Rapanna & Fajriah, 2018).

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Gini Ratio Indonesia Maret 2015 - Maret 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

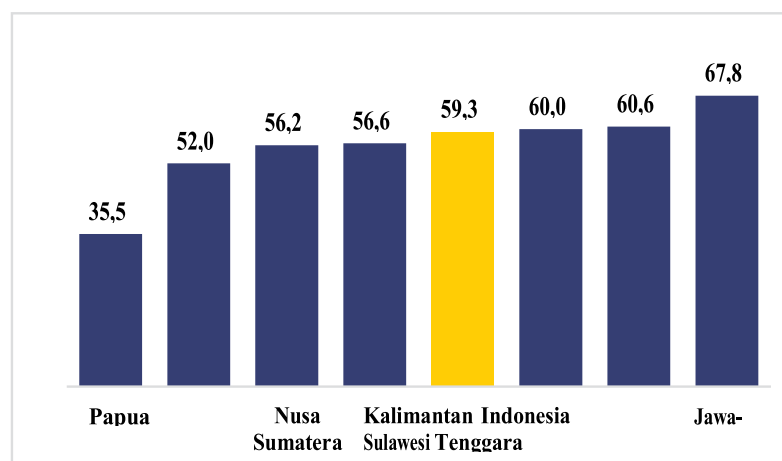
Secara nasional, nilai *Gini Ratio* Indonesia selama periode Maret 2015–Maret 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan mengalami penurunan sebesar 0,009 poin dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,402. Untuk daerah pedesaan, *Gini Ratio* pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, tidak berubah dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. *Gini Ratio* di daerah pedesaan pada Maret 2018 dan Maret 2019 masing-masing tercatat sebesar 0,324 dan 0,317.

Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36).

Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksnya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

**Gambar 1.4**  
**Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Pulau, 2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Perkembangan IDM menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan IPD. Dimana desa sangat tertinggal dan tertinggal berkurang secara signifikan dan jumlah desa berkembang dan maju bertambah secara signifikan pula di tahun 2019. Pengurangan desa sangat tertinggal mencapai 6.616 desa, sedangkan desa



tertinggal berkurang 12.991 desa. Sementara itu penambahan desa berkembang sebesar 15.723 desa dan desa maju bertambah 4.929 desa. Desa mandiri juga bertambah dari 174 desa menjadi 823 desa.

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IDM**



Sumber: Kemendesa PDTT, 2019 ([idm.kemendesa.go.id](http://idm.kemendesa.go.id))

Dalam pemerintahan era Presiden Jokowi-JK , pembangunan berfokus dalam membangun daerah pinggiran. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Besarnya dana transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar pedesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak putus sekolah. Untuk itu pemerintahan adalah hal yang ingin dilihat oleh semua orang dalam mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan itu harus menyatu, membawa tata kelola yang lebih baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono, 2013).

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. (Kurniawan, 2009).

Melihat dari sejarah, tingkat kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan sejak 1993. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi kemiskinan perdesaan saat itu mencapai 13,8 persen dari populasi sementara perkotaan hanya 13,4 persen. Meningkatnya industrialisasi yang banyak menciptakan lapangan kerja di kota-kota besar membuat angka kemiskinan perkotaan lebih rendah dari perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–Maret

2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56 persen menjadi 7,38 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,**  
**Maret 2019–Maret 2020**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2019	9,99	6,69
September 2019	9,86	6,56
Maret 2020	11,16	7,38
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2019	15,15	12,85
September 2019	14,93	12,60
Maret 2020	15,26	12,82
<b>Total</b>		
Maret 2019	25,14	9,41
September 2019	24,79	9,22
Maret 2020	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada didesa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang

penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan

sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada

hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009).

Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menganggarkan transfer ke daerah dan termasuk juga Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Transfer ke daerah mencapai Rp. 755,9 triliun meningkat dengan selisih Rp. 10,3 triliun pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 766,2 triliun. Sedangkan untuk dana desa juga ikut meningkat yang awalnya hanya Rp. 5,8 triliun menjadi Rp. 60 triliun. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Beda pemerintahan berbeda pula fokus penggunaan atau alokasi anggaran. Perbedaan itu muncul dikarenakan adanya faktor eksternal maupun perbedaan kebijakan masing – masing pemerintahan. Perbedaan fokus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir lima tahun (2014 – 2019) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009– 2014).

Pada awal pemerintahannya, Jokowi – JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung

mengalami peningkatan. Terutama pada masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan berfokus pada daerah pinggiran yaitu pedesaan.

Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

**Gambar 1.6**  
**Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa**



Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar diberikan kepada Desa. Pada tahun 2016 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 46,98 Triliun dengan rata – rata setiap desa sebesar Rp 643,6 juta. Pada tahun 2017 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 60 Triliun dengan rata -rata setiap desa sebesar Rp 800,4 juta. Pada tahun 2018, Dana Desa sebesar Rp 60 Triliun dengan rata -rata setiap desa sebesar Rp 800,4 juta. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp 70 Triliun dengan rata – rata setiap desa sebesar Rp 933,9 juta. Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 72 triliun dengan rata – rata setiap desa sebesar Rp 960,6 juta.

Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penciptaan lapangan kerja diharapkan akan lebih meningkat seiring meningkatnya dana desa. Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan.

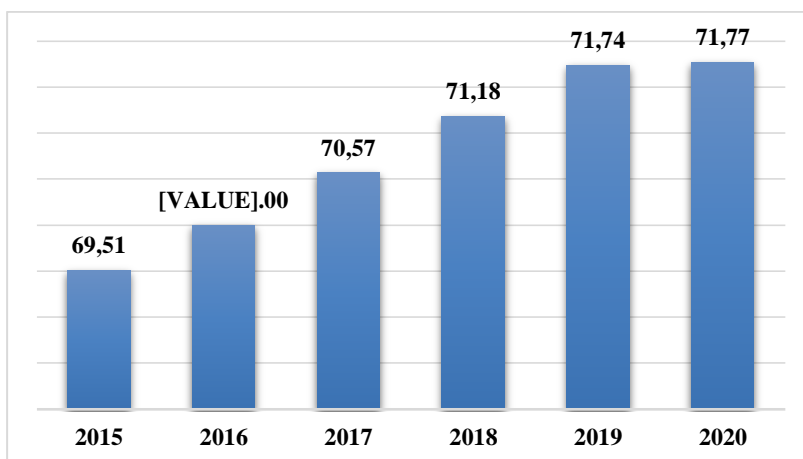
Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut ([Kemendes PDTT, 2016](#)).

Desa dalam kebijakan pemerintahan Jokowi – JK sangat berkembang pesat dan terus meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dengan cara meningkatkan potensi desa sehingga akan kualitas hidup masyarakat di desa bisa meningkat juga.

### **Gambar 1.7**

#### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, 2015-2020**

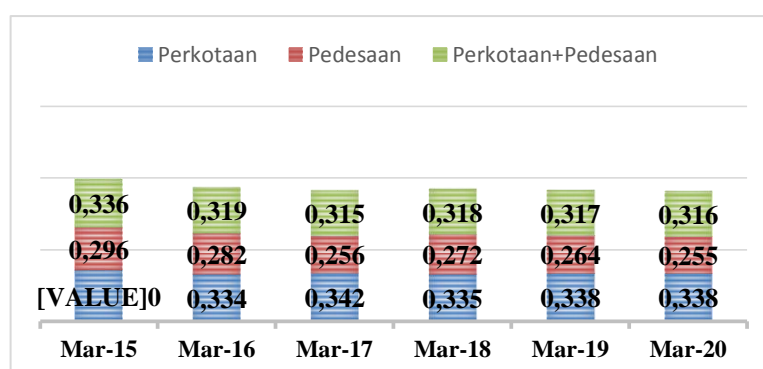




Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id))

Pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat dari 69,51 pada tahun 2015 menjadi 71,77 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,68 persen per tahun. Pada periode 2019-2020, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,04 persen. Selama periode 2015 hingga 2020, IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” dimulai pada tahun 2015.

**Gambar 1.8**  
Perkembangan *Gini Ratio* Sumatera Utara, Maret 2015 – Maret 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id))

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2015 sampai Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 0,026 dan mengalami

kenaikan pada bulan Maret 2017 sebesar 0,008 dibandingkan dengan Maret 2016 tetapi pada Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 0,013 dibandingkan dengan Maret 2017. Dan pada Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 tidak ada perubahan.

Untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* pada Maret 2015 hingga Maret 2017 mengalami penurunan. Pada Maret 2015 sebesar 0,296, Maret 2016 0,282, Maret 2017 0,256. tetapi di Maret 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,016 dibandingkan dengan Maret 2017, tetapi mengalami penurunan kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Pada Maret 2019 nilai Gini Ratio nya sebesar 0,264 dan Maret 2020 0,255.

Salah satu provinsi yang mendapatkan anggaran transfer daerah dan dana desa ialah provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki ibukota provinsi terbesar ke 4 di Indonesia yaitu kota Medan. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan bukit barisan, pesisir barat, kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perlembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Memiliki kekayaan sumberdaya alam, provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 PDRB terbesarnya ialah sektor pertanian mencapai 24,86%. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya mencapai 19,39%. Tingginya penyumbang PDRB di sektor pertanian tidak terlepas dari melimpahnya sumberdaya alam yang ada di provinsi Sumatera Utara. Namun dengan adanya sumberdaya yang melimpah pemerinahan provinsi Sumatera Utara masih belum

bisa memanfaatkannya. Hal tersebut di tandai dengan besarnya dana transfer daerah berupa bantuan Dana Desa yaitu Rp 4,197.97 milyar dalam anggaran APBN tahun 2017.

**Tabel 1.4**  
**APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	6.284.220.582.270,00	5.761.270.412.051,31	91,68
Pendapatan Transfer	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.068.000.000,00	17.680.635.177,00	125,68
Jumlah Pendapatan	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20
Belanja			
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.899.945.553.856,85	91,01
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.249.600.483.637,40	79,22
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00	85,20
Jumlah Belanja	11.381.194.207.215,19	10.170.845.213.205,25	89,37
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pajak	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
Jumlah Transfer	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
Jumlah Belanja Dan Transfer	14.726.662.153.406,19	13.440.323.705.747,25	91,27
Surplus/Defisit	(692.322.808.436,19)	(360.725.070.277,94)	52,10
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	981.167.561.436,19	981.167.561.436,19	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	288.844.753.000,00	283.844.753.000,00	98,27

Pembiayaan Netto	692.322.808.436,19	697.322.808.436,19	100.72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	336.597.738.158,25	

Sumber: LK Audited Pemprov Sumatera Utara TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp5.761.270.412.051,31 atau 44,05% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp7.300.647.588.241,00 atau 55,82% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17.680.635.177,00 atau 0,14% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp8.899.945.553.856,85 atau 66,22% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.249.600.483.637,40 atau 9,30% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp21.299.175.711,00 atau 0,16% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bagi hasil pajak sebesar Rp3.269.478.492.542,00 atau 24,33% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp360.725.070.277,94. Agar tidak terjadi defisit, Pemprov Sumatera Utara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp697.322.808.436,19.

Dalam APBN tahun 2017, tentang transfer Daerah dan Dana Desa. Tiap desa di provinsi Sumatera Utara mendapat transfer Dana Desa sebesar Rp 720,442 juta yang di bagikan secara merata guna di alokasikan sesuai dengan RPJMDes yang berlaku di desa tersebut. Berikut paparan kabupaten/kota yang mendapatkan transfer Dana Desa di provinsi Sumatera Utara

**Tabel 1.5**  
**Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2020**  
**Di Provinsi Sumatera Utara**

No	Nama Daerah Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi Per Desa	Alokasi Per Kab/Kota	Alokasi Formula	Jumlah
1	Asahan	177	662,806	117,316,662	29,506,131	147,485,599
2	Dairi	161	662,806	106,711,766	20,923,900	128,298,472
3	Deli Srdang	380	662,806	251,866,280	54,572,133	307,101,219
4	Karo	259	662,806	171,666,754	25,250,134	43,079,694
5	Labuhanbatu	75	662,806	49,710,450	20,956,210	71,329,466
6	Langkat	240	662,806	159,073,440	47,591,717	207,327,963
7	Mandaling Natal	377	662,806	249,877,862	34,840,057	285,380,725
8	Nias	170	662,806	122,677,020	43,550,277	166,890,103
9	Simalungun	386	662,806	255,843,116	37,189,335	293,695,257
10	Tapanuli selatan	211	662,806	139,852,066	28,430,172	268,945,044
11	Tapanuli Tengah	159	662,806	105,386,154	30,188,814	136,237,774
12	Tapanuli Utara	241	662,806	159,736,246	29,973,679	190,372,731
13	Toba Samosir	231	662,806	153,108,186	22,785,607	176,556,599
14	Kota Padang Sidempuan	42	662,806	27,837,852	12,761,236	41,261,894
15	Pakpak Barat	52	662,806	34,465,912	15,093,632	50,222,35
16	Nias Selatan	459	662,806	304,227,954	40,514,242	345,405,002
17	Humbang Hasundutan	153	662,807	101,409,318	21,549,526	123,621,65
18	Serdang Bedagai	237	662,806	157,085,022	26,928,000	184,675,828
19	Samosir	128	662,806	84,839,168	21,510,824	107,012,798
20	Batu Bara	141	662,806	93,455,646	24,334,698	118,453,15
21	Padang Lawas	303	662,806	200,830,218	28,033,355	229,526,374
22	Padang Lawas Utara	387	662,806	255,843,116	30,381,824	286,887,746
23	Labuhanbatu Selatan	52	662,806	34,465,912	29,745,736	61,874,454
24	Labuhanbatu Utara	82	662,806	54,350,092	25,386,325	80,399,223
25	Nias Utara	112	662,806	74,234,272	41,434,204	116,331,282
26	Nias Barat	105	662,806	69,594,630	29,552,126	99,809,562
27	Kota Gunungsitoli	98	662,806	64,954,988	20,338,764	85,596,558
<b>JUMLAH</b>		<b>5,418</b>	<b>17,895,762</b>	<b>3,428,753,882</b>	<b>77,322,608</b>	<b>4,237,447,235</b>

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa kabupaten Nias Selatan menerima transfer Dana Desa terbesar yaitu Rp 345,405,002 dengan jumlah desa 459 dan jumlah transfer yaitu Rp 662,806 Namun kota Padang Sidempuan mendapatkan transfer terendah yaitu Rp 41,261,894 dengan jumlah desa 42.

Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan memiliki 14 kecamatan yaitu kecamatan Batang Angkola, kecamatan Sayur Matinggi, kecamatan Tantom Angkola, kecamatan Angkola Timur, kecamatan Angkola Selatan, kecamatan Angkola Barat, kecamatan Angkola Sangkunur, kecamatan Batang Toru, kecamatan Marancar, kecamatan Muara Batang Toru, kecamatan Sipirok,

kecamatan Arse, kecamatan Saipar Dolok Hole, kecamatan Aek Bilah. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil estimasi penduduk pertengahan tahun 2018 sebanyak 280.283 jiwa yang terdiri dari 139.280 jiwa penduduk laki-laki dan 141.003 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Tapanuli Selatan (4.355,35 Km<sup>2</sup>), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 64 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Angkola Barat yakni sebanyak 241 orang per kilometer persegi, dan yang paling rendah adalah Kecamatan Aek Bilah yakni 16 orang per kilometer persegi.

Pada tahun 2018 ini kabupaten Tapanuli Selatan penyumbang PDRB terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan yaitu Rp. 4.058.969,32 , sedangkan sektor Industri Pengolahan hanya menyumbang Rp. 573.070,98.

**Tabel 1.6**  
**Produk Regional Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Selatan**  
**Menurut Lap.Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**(milyar rupiah), 2019 – 2020**

	Lapangan Usaha Industri Origin	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4 273,11	4 442,34
B	Pertambangan dan Penggalian	1 237,58	1 164,47
C	Industri Pengolahan	601,06	574,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,16	6,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	7,62	7,95
F	Konstruksi	1 109,73	1 082,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 096,77	1 080,49
H	Transportasi dan Pergudangan	145,30	140,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	138,28	135,19
J	Informasi dan Komunikasi	65,93	70,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	77,40	80,68
L	Real Estate	189,78	197,15
M,N	Jasa Perusahaan	4,94	4,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	579,22	576,91

P	Jasa Pendidikan	71,57	74,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,07	78,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,16	3,10
	PDRB ADHK	9 683,66	9 721,77

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Tabel 1.6 Berdasarkan Tabel diatas selama kurun waktu tahun 2019 - 2020 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi hampir setengah dari total keseluruhan PDRB di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 4 273,11, mengalami peningkatan menjadi Rp. 4 442,34 di tahun 2020.

Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian, tetapi sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit penurunan di tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 1 273,58 terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan, menurun menjadi Rp. 1 164,47 di tahun 2020. Selanjutnya sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sementara itu, sektor lain di luar dari ke empat sektor yang telah disebutkan di atas mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan.

Data yang diambil dari beberapa situs portal yang ada di setiap desa hanya beberapa yang belum menerapkan asas tersebut, guna alokasi dana desa yang

deberikan pemerintah yang bersumber pada APBN dapat dioptimalkan. Dengan adanya penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin anggaran, sehingga seluruh elemen masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa dan mengawasi dana desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal sudah mewajibkan bagi setiap kepala desa harus mendirikan baliho tentang paparan alokasi dana desa dan APBDes dalam waktu satu tahun kerja.

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transfer dana daerah berupa dana desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran dana desa yang besaran transfernya sama. Karena setiap desa pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga berbeda. Di desa yang sedang berkembang membutuhkan sokongan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian di desa tersebut.

Pemerintah sudah harus melakukan evaluasi kebijakan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan untuk memastikan pembagian dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut.



Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu  
**“Analisis Evaluasi Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai analisis evaluasi dana desa di kabupaten tapanuli selatan :

1. IPM meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, disaat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.
2. Indonesia tercatat memiliki rata – rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara – negara lainnya selama kurun waktu 2006 – 2015 yang mencapai 5,7%, akan tetapi nyatanya masih ada masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan.
3. Perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
4. Pelaksanaan anggran Dana Desa yang sangat besar tersebut masih mempunyai kendala. Salah satunya masih rendahnya aparaturn Pemerintah Daerah dan Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa.

5. Adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran Dana Desa.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah di atas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada analisis evaluasi dana desa di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Dana Desa di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara
2. Bagaimana perkembangan potensi ekonomi dan Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara
3. Bagaimana perkembangan sosial ekonomi Kecamatan Sipirok sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Melakukan estimasi tentang faktor penentu Dana Desa Selatan di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara pasca tahun 2015

2. Melakukan Analisa ekonomi secara deskriptif tentang indikator potensi ekonomi dan Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 – 2019
3. Melakukan analisa sosial ekonomi Kecamatan Sipirok sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermanfaat, yakni:

1. Manfaat akademik :
  - a. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi publik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
  - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui evaluasi kebijakan dana desa.
  - c. Memberikan pengetahuan dalam mengelola anggaran pemerintah khususnya Dana Desa.
2. Manfaat non akademik :
  - a. Bagi pemerintah daerah desa Paranjulu, desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya Alokasi Dana Desa.
  - b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
  - c. Dapat menjadikan suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi**

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak

(Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara (Jhingan, 2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan

berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki

tujuan (Todaro & Smith, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

## **A. Teori Aliran Klasik**

### **1. Adam Smith**

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

#### **a. Hukum alam**

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan

kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

#### b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: pertama, meningkatnya keterampilan pekerja. Kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. ketiga, penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

#### c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu



diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## **2. Teori Schumpeter**

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara

yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan, 2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

### **3. Teori David Ricardo**

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi (Jhingan, 2010) . Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan gandum benar – benar inelastik
5. Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu

9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

#### **4. Teori Arthur Lewis**

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

##### **4.1 Perekonomian Tradisional**

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini

ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

#### **4.2 Perekonomian Industri**

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para

Pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk

horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

## **5. Teori Hollis B. Chenery**

Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal

dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

## **B. Teori Aliran Neo-Klasik**

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut,

1. Neo-klasik merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.

3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.
4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional, serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-



negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

### **C. Teori Aliran Keynesian**

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, M.L, 2010)

#### **D. Teori Harrod-Domar**

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capitaloutput ratio = ICOR)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang – barang modal

yang habis atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan – bahan). Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengasumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal,  $K$ , dan total GDP,  $Y$ -misalnya, jika \$3 dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan tambahan GDP tahun sebesar \$1- berarti setiap tambahan neto pada persediaan dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional ( *national output*), GDP.

Misalkan hubungan ini, yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai **rasio modal-output** (*capital-output-ratio*), kira – kira adalah 3 berbanding 1. Jika kita tetapkan rasio modal – output,  $k$ , dan selanjutnya kita andaikan juga bahwa **rasio tabungan neto** (*net savings ratio*),  $s$ , adalah bagian tetap output nasional (misalnya, 6%) dan total investasi baru ditentukan oleh tingkat tabungan total, kita dapat membuat model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau ( $s$ ), dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \quad (2.1)$$

2. Investasi neto ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal,  $K$ , mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output,  $Y$ , seperti telah ditunjukkan oleh

rasio modal-output,  $c$ , maka :

$$\frac{k}{y} = c$$

**Atau**

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = c$$

**atau akhirnya**

$$\Delta k = c\Delta y \quad (2.3)$$

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto ( $S$ ) harus sama dengan investasi neto ( $I$ ), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa  $S = sY$  dan dari persamaan (2.2) dan (2.3), telah mengetahui bahwasannya :

$$I = \Delta k = c\Delta y$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = c\Delta y = \Delta K = I \quad (2.5)$$

Atau untuk menyederhanakannya menjadi

$$sY = c\Delta Y \quad (2.6)$$

Akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c} \quad (2.7)$$

Perhatikan bahwa bagian kiri persamaan 2.7  $\Delta Y/Y$ , merepresentasikan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP.

Persamaan 2.7 merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa

tingkat pertumbuhan GDP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto,  $s$ , dan rasio modal-output nasional,  $e$  secara bersama. (Todaro & Smith, 2011).

### **E. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) to SDG's**

Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui dan digagas *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan

MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indicator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs (UNDP, 2015).

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain (UNDP, 2015). Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

### **2.1.2 Teori Pendapatan Nasional**

Menurut (N. Gregory Mankiw ) dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Makro" Pendapatan nasional (national income) adalah total pendapatan yang

diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional tidak menghitung pajak usaha tidak langsung (seperti pajak penjualan) dan tidak menghitung subsidi usaha.. Adapun pengertian Pendapatan Nasional dapat dilihat melalui tiga pendekatan yaitu :

**A. Pendekatan Produk**

Melalui pendekatan ini Pendapatan Nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai ditambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu Negara dalam periode tertentu.

$$Y = \sum_{i=1}^{17} NTB_i = NTB_1 + NTB_2 + \dots + NTB_{17} \dots \dots \dots (2-1)$$

**B. Pendekatan Pendapatan**

Pendapatan yang diterima oleh pemilik factor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu Negara dalam satu periode.

$$Y = W + r + i + \pi \dots \dots \dots (2-2)$$

**C. Pendekatan pengeluaran**

Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik didalam negeri selama periode tertentu

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (2-3)$$

Untuk menghitung pendapatan nasional, Ada beberapa konsep dalam pendapatan squad, antara lain yaitu :

**1. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB)**

Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi dalam negeri dan luar negeri atau nilai barang dan jasa dalam Negara yang di produksikan oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga Negara asing.



## 2. *Gross Nasional Product* (GNP) atau *Produk Nasional Bruto* (PNB)

Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi domestic ditambah faktor produksi domestic luar negeri. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GDP} = \text{GNP} - \text{NYFln}(\text{pendapatan netto factor dari luar negri}) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dimana NYfln adalah pendapatan netto faktor produksi dari luar negeri (pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayarkan diluar negeri) Maka dapat dirumuskan pendapatan nasional atau *National income* (NI)

$$\text{NI} = \text{GNP} - \text{Pajak tidak langsung} - \text{Depresiasi} + \text{subsidi}$$

Atau :

$$\text{NI} = \text{GDP} + \text{Nyfln} - \text{Pajak tidak langsung} - \text{Depresiasi} + \text{subsidi} \dots\dots\dots(2-5)$$

Adapun pengertian dari rumus tersebut adalah :

- a. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah yang dikenakan atas barang dan jasa pada saat barang tersebut terjual kepada pihak lain, terutama konsumen atau ang import dari luar negeri.
- b. Depresiasi adalah pengurangan nilai atas barang modal yang digunakan dari waktu ke waktu sebagai akibat dari penggunaan barang modal dalam proses produksi dan karena barang tersebut semakin lama semakin usang.

Untuk memperoleh nilai pendapatan Nasional Netto adalah dengan cara Pendapatan Nasional Bruto – Deprisiasi atau Penyusutan.

- c. Pendapatan Pribadi ( *personal income*) dan pendapatan disposable dapat dirumuskan :

$$\text{PI} = \text{NI} - \text{Pajak tidak langsung}$$

$$Yd = PI - \text{Pajak perseorangan} \dots \dots \dots (2-6)$$

Dimana :

PI = *personal income* (pendapatan yang siap dibelanjakan)

Pendapatan pribadi (*Personal income*) adalah semua jenis pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu Negara, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun.

d. Pendapatan disposable/ *Disposable Income* (Yd) adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan.

Pada setiap tahunnya dinegara-negara berkembang, nilai GDP senantiasa lebih besar dari pada GNP. Ini merupakan hal yang umum bagi sebuah Negara berkembang. Karena nilai produk orang asing diindonesia lebih besar dari pada nilai produk orang Indonesia diluar negeri.

### 2.1.3 Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk

transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993).

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

### **1. Musgrave dan Rostow**

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah

tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

## **2. Wagner**

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-

Berikut Formula Hukum Wagner :

$$\begin{array}{ccc} \text{Formula Hukum Wagner} \\ \text{(Mangkoesoebroto, 1993; 170)} \\ \frac{PkPPP1}{PPK1} & \frac{PkPPP2}{PPK2} & \dots & \frac{PkPPPn}{PPKn} \end{array}$$

**Keterangan:**

PPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 1993; 172).

### **3. Peacock dan Wiseman**

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak

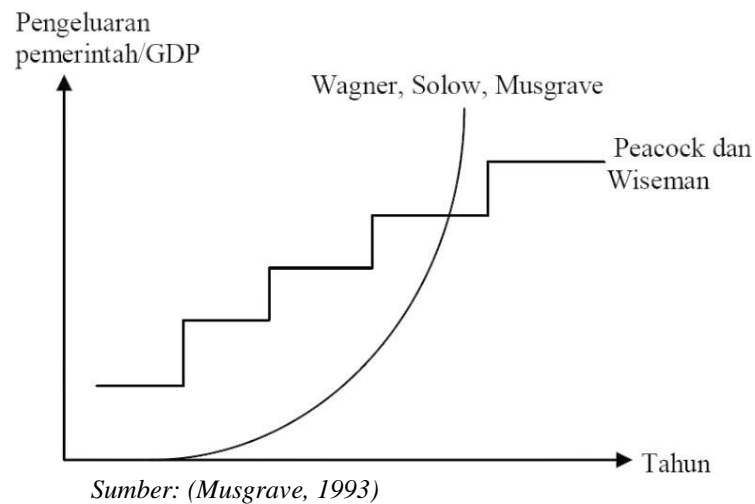
tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang.

Dalam Mangkoesobroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

**Gambar 2.1**

**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**



**2.1.4 Kemiskinan**

Menurut World Bank dalam Kumalasari (2011), mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

Kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Levitan dalam Badruddin (2009), mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Friedman yang juga mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.



Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang apabila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

## **2.2 Regulasi Pemerintah**

### **2.2.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004).

### **2.2.2 Desentralisasi Fiskal**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor

yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dan bantuan (grants). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (vertical equalization), pemerataan horizontal (horizontal equalization), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (correcting spatial externalities), mengerahkan prioritas (redirecting priorities), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

### **2.2.3 Kebijakan Dana Desa**

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana

Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

#### **A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota,

menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## **B. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

a. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan

pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

#### **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**



No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<b>Shihabuddin Fuady Rangkuti</b> , Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia	Model Ekonomi Panel Data	Dana Desa, PDRB, Belanja Daerah, IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM, PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM, Belanja Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pembentukan IPM
2.	<b>Intan Mala Sari, M. Faisal Abdullah</b> Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulung Agung	Kualitatif Deskriptif	Dana Desa, ADD, Kemiskinan Desa	Diketahui bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan desa, dan Alokasi Dana Desa juga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Desa.
3.	<b>Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V.J. Panelewen, Arie D.P. Mirah (2017)</b> , Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Deskriptif Kualitatif	Dana Desa, Pendapatan Masyarakat, Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa mempunyai manfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa

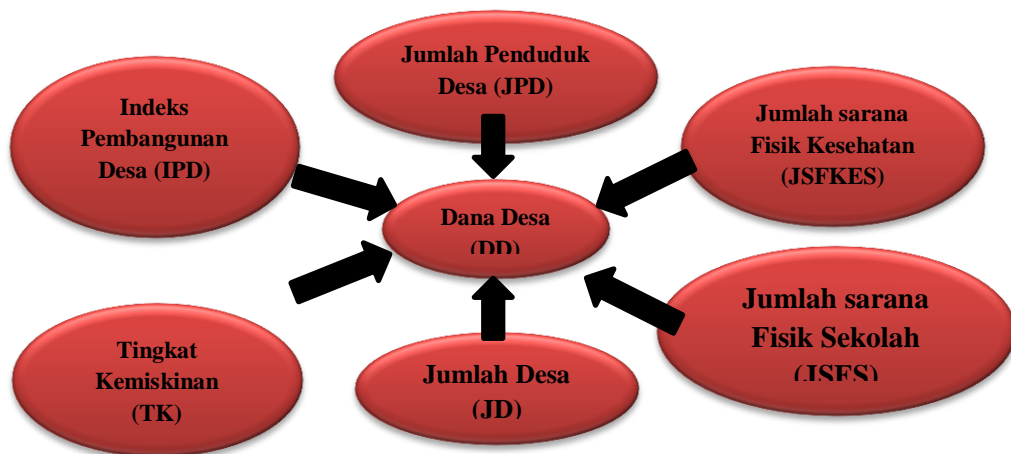
#### 2.4 Kerangka Analisis Penelitian



## Gambar 2.2 Kerangka Analisis Penelitian

### 2.4.1 Kerangka Model Estimasi

Gambar 2.3 Kerangka Model Estimasi



Dalam kerangka model estimasi variabel Jumlah Penduduk Desa (JPD), Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS), dan Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES), Jumlah Desa (JD), Tingkat Kemiskinan (TK), Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara lang terhadap Dana Desa (DD), yang dimana Dana Desa merupakan variabel terikat.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakkukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk

memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungan. (Kuncoro,2015).

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

#### **3.1.1 Penelitian Menurut Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang diteliti lebih dari satu; dan *time series*, yaitu waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang diteliti adalah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2014 dan 2018 yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **3.1.2 Penelitian Menurut Metode**

Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian historis yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian kolerasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh kolerasi yang ada di antara variabel yang diteliti.

### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Jumlah Penduduk Desa (JPD), Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS), Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES), Jumlah Desa (JD), Tingkat Kemiskinan (TK), Indeks Pembangunan Desa (IPD) terhadap Dana Desa (DD).

**Tabel 3.1**

#### Definisi Operasional

Variabel	Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Sumber Data
Dana Desa (DD)	Variabel Terikat	Besar dana desa yang diterima dalam satuan (rupiah)	Kementerian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Jumlah Penduduk Desa (JPD)	Variabel Bebas	Jumlah penduduk Desa Kabupaten Se-Sumatera Utara dalam (jiwa)	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS)	Variabel Bebas	Jumlah sekolah menurut tingkatan (unit)	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES)	Variabel Bebas	Jumlah desa yang memiliki sarana kesehatan (unit)	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Jumlah Desa (JD)	Variabel Bebas	Jumlah Desa Kabupaten Se-Sumatera Utara (Desa)	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Tingkat Kemiskinan (TK)	Variabel Bebas	Persentase Kemiskinan (persen)	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Variabel Bebas	Status Tingkat Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Se-Sumatera Utara	BPS(Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

### **3.3.2 Waktu**

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021.

## **3.4 Jenis dan Sumber Data**

### **3.4.1 Jenis**

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dalam skala *numerik*, sedangkan data kualitatif data yang tidak dapat diukur dalam skala *numerik*. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat yang dibedakan menjadi data *interval* dengan data *rasio*.

### **3.4.2 Sumber**

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2013). Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website - website resmi Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut Program Dana Desa dan Indeks Pembangunan Desa. Melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung dan segera dikembalikan kepada peneliti.

### 3.6 Model Estimasi

Penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Dana Desa dengan objek penelitian di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$DD_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 LWD_{rt} + \alpha_2 JPD_{rt} + \alpha_3 JSFS_{rt} + \alpha_5 JSFKES_{rt} + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-6)$$

Dimana :

- DD<sub>rt</sub> = Dana Desa
- JPD<sub>rt</sub> = Jumlah Penduduk Desa
- JSFS<sub>rt</sub> = Jumlah Sarana Fisik Sekolah
- JSFKES<sub>rt</sub> = Jumlah Sarana Fisik Kesehatan
- JD<sub>rt</sub> = Jumlah Desa
- TK<sub>rt</sub> = Tingkat Kemiskinan
- IPD<sub>rt</sub> = Indeks Pembangunan Desa
- r = Kabupaten (Region)

- t = Unit Waktu (Tahun)
- $\alpha_0$  = Koefisien regresi (konstanta)
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  = Parameter dari setiap variabel bebas
- $\epsilon_t$  = *Error Terms*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

### 3.7 Metode Estimasi

Penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Dana Desa dengan objek penelitian di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern  $COV(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0 : i \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern  $Var(\epsilon_i) = \sigma^2$
4. Covariance antar  $\epsilon_i$  darisetiap variabel bebas(x) = 0 setiap variabel bebas  
(x) = 0

5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel - variabel bebastidakmengandung hubungan liniertertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). (Kuncoro, 2013).

### **3.8 Teknik Analisis Tujuan Penelitian**

#### **3.8.1 Analisis Deskriptif**

Merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

#### **3.8.2 Metode Regresi Linier**

##### **1. Penaksiran**

##### **A. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, koefisien determinasi ( $R^2$ ) menghadapi masalah karena tidak



memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R<sup>2</sup>* yang dirumuskan (Kuncoro,2013)

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 - \dots\dots\dots (3-2)$$

- Dimana:      R<sup>2</sup>      = Koefisien Determinasi  
                   n        = Jumlah Sampel  
                   k        = Jumlah Variabel Independen

**B. Korelasi (r)**

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya suatu hubungan linier antara dua variabel koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut sedangkan tanda + (positif) dan – (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – (negatif) artinya korelasi antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan nilai Y.

**2. Pengujian (Test Diagnostic)**

**a) Uji Parsial (Uji t) Statistik**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara *individual* dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Kuncoro, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh JPD, LWD, JSFS, dan

JSFKES secara individual terhadap DD. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah – langkah pengujian:

1. Hipotesa

- JPD

$H_0 : \alpha_2 = 0$  ( JPD tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_2 \neq 0$  ( JPD berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

- JSFS

$H_0 : \alpha_3 = 0$  ( JSFS tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_3 \neq 0$  ( JSFS berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

- JSFKES

$H_0 : \alpha_4 = 0$  ( JSFKES tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_4 \neq 0$  ( JSFKES berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

- JD

$H_0 : \alpha_4 = 0$  ( JD tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_4 \neq 0$  ( JD berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

- TK

$H_0 : \alpha_4 = 0$  ( TK tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_4 \neq 0$  ( TK berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

- IPD

$H_0 : \alpha_4 = 0$  ( IPD tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_0 : \alpha_4 \neq 0$  ( IPD berpengaruh secara negatif dan dan signifikan terhadap DD)

## 2. Uji Statistik

Dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

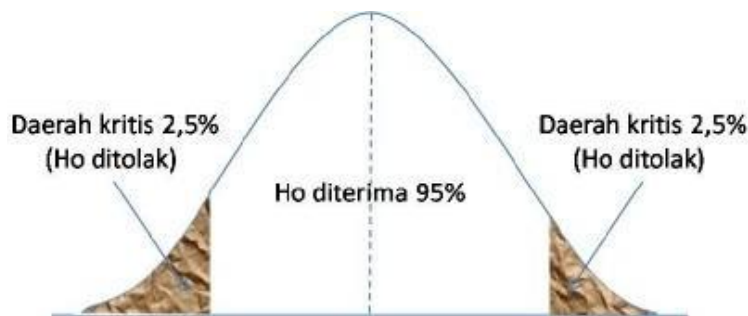
$$t = \frac{\alpha_i}{se.\alpha_i} \dots\dots\dots(3-3)$$

dimana :  $\alpha_i$  : koefisien regresi

se : standar eror dibandingkan dengan  $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n-1)$

## 3. Kriteria Uji :

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$  hal lain tolak  $H_0$



**Gambar 3.1 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis**

Atau dalam olahan *software*, dikatakan signifikan jika nilai sig < = 5%  $\alpha$

### b) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Kuncoro, 2013).

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model ekonometrik menunjukkan apakah JPD, JSFS, JSFKES, JD, TK, IPD secara keseluruhan signifikan secara statistic dalam mempengaruhi DD.

#### 1. Hipotesa

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$  (JPD, JSFS, JSFKES, JD, TK, IPD secara bersama- sama

tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

$H_a : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 \neq 0$  (JPD, JSFS, JSFKES, JD, TK, IPD secara bersama- sama

tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DD)

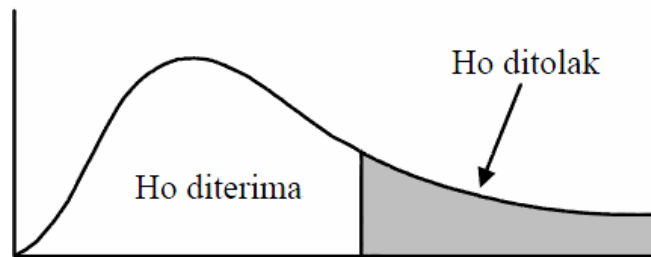
2. Uji statistik F

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(N-K)} \dots\dots\dots(3-4)$$

Dimana : K = Jumlah parameter yang diestimasi yang termasuk konstanta

N = Jumlah observasi dibanding dengan  $F_{tabel} = F(\alpha, n - K - 1)$

3. Kriteria Uji



Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ . Atau dalam distribusi kurva F

**Gambar 3.2 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis**

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $sig < \alpha = 5\%$

4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima  $H_0$

**c) Uji Asumsi Klasik**

Metode OLS mendapatkan nilai *estimator* yang diharapkan dapat memenuhi sifat *estimator* OLS yang BLUE (*Blue Liniear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi

OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

#### **a. Multikolinearitas**

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### **b. Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setaip gangguan

tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai  $R^2$  yang didapat digunakan untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

### **c. Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variable 1 gangguan tidak acak. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila  $d_j$  dan  $d_u$  adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4 - d_u$  maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

### **d) Uji Hausman**

Uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu Fixed Effect atau Random Effect, maka selanjutnya akan dilakukan uji signifikan

antara model Fixed Effect dan Random Effect, untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan, pengujian ini disebut dengan Uji Hausman.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistic untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang akan digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan Hipotesis berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-square sebagai berikut:

$$m = q \text{ Var}(q') - 1 q'$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak K, dimana K adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka, model yang tepat adalah model Random Effect.

#### 1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Efek tetap disini dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (Time Invariant) Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (Dummy). Oleh Karena itu, model ini sering disebut juga dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV).

#### 2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel sama, metode efek random menggunakan residual,

yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun untuk menganalisis metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar dari pada banyaknya koefisien.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terletak pada  $1^{\circ}$  -  $4^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}$  -  $100^{\circ}$  Bujur Timur. Sumatera Utara memiliki jumlah daerah 33 Kabupaten/Kota yang ibu kotanya terletak di kota Medan. Provinsi Sumatera Utara memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang cukup besar sehingga daerah Kabupaten/Kota tersebut memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang berada di bagian barat Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki daratan dengan luas daratan  $72.981,23 \text{ km}^2$  dan luas lautan  $109.433,02 \text{ km}^2$ . Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas  $6.262,00 \text{ km}^2$ , atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas  $6.134,00 \text{ km}^2$  atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas  $6.030,47 \text{ km}^2$  atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas  $31,00 \text{ km}^2$  atau sekitar 0,04 persen.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di

wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2017, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Batas wilayah provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Aceh

Terletak diatas Permukaan laut. Kota Gunung Sitoli 0-600m, Kota Padang Sidempuan 260-1100m, Kota Binjai 0-28m, Kota Medan 2.5-37.5m, Kota Tebing Tinggi 26-34m, Kota Pematang Siantar 400-500m, Kota Tanjung Balai 0-3m, Kota Sibolga 0-50m, Kab.Nias Barat 0-80m, Kab.Nias Utara 0-478m, Kab.Labuhanbatu Utara 0-700m, Labuhanbatu Selatan 0-500m, Kab.Padang Lawas , Kab.Padang lawas Utara 0-1915m, Kab.Batu Bara 0-50m, Kab.Serdang Bedagai 0-500m, Kab.Samosir 904-2157m, Kab.Pakpak Barat 700-1500m, Kab.Humbang Hasundutan 330-2075m, Kab.Nias Selatan 0-800m, Kab.Langkat 0-1200m, Kab.Deli Serdang 0-500m, Kab.Karo 120-1420m, Kab.Dairi 400-1600m, Kab.Simalungun 0-369m, Kab.Asahan 0-1000m, Kab.Labuhanbatu 0-700m, Kab.Toba Samosir 900-2200m, Kab.Tapanuli Utara 150-1700m,

Kab.Tapanuli Tengah 0-1266m, Kab.Tapanuli Selatan 0-1915m, Kab.Mandailing Natal 0-1000m, Kab.Nias 0-800m.

**Table 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara 2020**

No	Kabupaten/Kota	Luas	%	Desa
1	Nias	1.842,51	2,50	170
2	Mandailing Natal	6.134,00	8,40	380
3	Tapanuli Selatan	6.030,47	8,26	212
4	Tapanuli Tengah	2.188,00	3,00	159
5	Tapanuli Utara	3.791,64	5,20	241
6	Toba Samosir	2.328,89	3,19	231
7	Labuhan Batu	2.156,02	2,95	75
8	Asahan	3.702,02	5,07	177
9	Simalungun	4.369,00	5,99	386
10	Dairi	1.927,80	2,62	161
11	Karo	2.127,00	2,91	259
12	Deli Serdang	2.241,68	3,07	380
13	Langkat	6.262,00	8,58	240
14	Nias Selatan	1.825,20	2,50	353
15	Humbang Hasudutan	2.335,35	3,20	153
16	Pakpak Barat	1.218,30	1,67	52
17	Samosir	2.069,05	2,84	128
18	Serdang Bedagai	1.900,22	2,60	237
19	Batu Bara	922,20	1,26	141
20	Padang Lawas	3.892,02	5,33	386
21	Padang Lawas Utara	3.918,05	5,37	303
22	Labuhan Batu Selatan	3.596,00	4,93	52
23	Labuhan Batu Utara	3.570,98	4,89	82
24	Nias Utara	1.202,78	1,65	112
25	Nias Barat	473,73	0,65	105
26	Sibolga	41,31	0,06	-
27	Tanjungbalai	107,83	0,15	-
28	Pematangsiantar	55,66	0,08	-
29	Tebing Tinggi	31,00	0,05	-
30	Medan	265,00	0,36	-
31	Binjai	59,19	0,08	-
32	Padangsidempuan	114,66	0,16	42
33	Gunungsitoli	280,78	0,38	98
	<b>Sumatera Utara</b>	<b>72.025,09</b>	<b>100,00</b>	<b>5.315</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00km<sup>2</sup> atau sekitar 8,50 persen dari total luas provinsi Sumatera Utara dan memiliki 240 desa, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.030,00Km<sup>2</sup> atau 8,26 persen dengan 380 desa . Sedangkan luas daerah terkecil adalah kabupaten Nias Barat dengan luas lahan 473,73 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,65 persen dengan jumlah desa 105, dan diikuti oleh kabupaten Batu Bara dengan luas 922,20 atau 1,26 persen dari total luas wilayah provinsi sumatera utara dan memiliki 141 desa . jika dilihat dari Kota yang ada di provinsi Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli merupakan kota yang terluas dibandingkan dengan kota lain yaitu sebesar 280,78Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,38 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara dan memiliki 98 desa, diikuti Kota Medan dengan luas 265,00Km<sup>2</sup> atau 0,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas sebesar 31,00Km<sup>2</sup> atau 0,04 persen, dan diikuti oleh Kota Pematangsiantar sebesar 55,66Km<sup>2</sup> atau 0,08 persen.

#### **4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi**

##### **A. Iklim**

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba. Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa bumi. Sepanjang 2019 tercatat sebanyak 528 kali kejadian gempa bumi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dimana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 356 kali.

#### **A. Topografi**

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 Km<sup>2</sup>, antara 12 – 40 persen seluas 6.305 Km<sup>2</sup> dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km<sup>2</sup>, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 1.129,20 Hektar (Ha) atau 1,57 persen. Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km<sup>2</sup> atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km<sup>2</sup> atau 65,23 persen dari luas

wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di Sumatera Utara serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

### 4.1.3 Kondisi Demografi

#### A. Penduduk

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nias	69753	73566	143391
2	Mandailing Natal	219663	227624	447287
3	Tapanuli Selatan	140134	141797	281931
4	Tapanuli Tengah	189007	187660	376667
5	Tapanuli Utara	149205	152584	301789
6	Toba Samosir	91237	92475	183712
7	Labuhan Batu	249772	244456	494178
8	Asahan	366603	363192	729795
9	Simalungun	432425	435497	867922
10	Dairi	141983	142321	284304
11	Karo	206395	209483	415878
12	Deli Serdang	1104894	1090815	2195709
13	Langkat	524481	517294	1041775
14	Nias Selatan	158673	161229	319902
15	Humbang Hasudutan	94517	95669	190186

16	Pakpak Barat	24699	24236	48935
17	Samosir	62731	63475	125099
18	Serdang Bedagai	309382	307014	616396
19	Batu Bara	209639	206854	416493
20	Padang Lawas	140916	140323	281239
21	Padang Lawas Utara	137001	135712	272713
22	Labuhan Batu Selatan	172877	166105	338982
23	Labuhan Batu Utara	183722	180094	363816
24	Nias Utara	68310	69675	137967
25	Nias Barat	39314	42840	82154
26	Sibolga	43979	43647	87626
27	Tanjungbalai	88181	87042	175223
28	Pematangsiantar	124553	130784	255317
29	Tebing Tinggi	81281	83121	164402
30	Medan	1125267	1154627	2279894
31	Binjai	138064	138533	276597
32	Padangsidempuan	108021	113806	221827
33	Gunungsitoli	69598	72828	142426
	<b>Total</b>	<b>7 266 207</b>	<b>7 296 342</b>	<b>14 562 549</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat 14.562.549 jiwa dengan rincian 7.266.207 jiwa penduduk laki-laki dan 7.296.324 jiwa penduduk perempuan. Maka diatas bahwa Kabupaten yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduknya 2.195.709 jiwa hal ini disebabkan karena daerah Deli Serdang sangat potensial baik posisi geografis dan aksesibilitas yang cukup strategis yang mengelilingi kota Medan sebagai ibukota

Provinsi Sumatera Utara. Dan Kabupaten yang paling sedikit jumlahnya adalah Nias barat dengan 82.154 jiwa hal ini terjadi karena di pulau Nias telah dimekarkan terjadi 4 bagian dan salah satunya Nias barat yang menjadi salah satu faktor sedikitnya jumlah penduduknya. Dilihat dari Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara maka jumlah penduduk yang ada di Kota Medan merupakan penduduk yang paling besar yaitu sebesar 2.279.894 jiwa dan yang paling terkecil yaitu Kota Sibolga dengan jumlah penduduk sebesar 87.626 jiwa.

## B. Tenaga Kerja

**Tabel 4.3**

**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020**

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama <sup>1</sup>			Jumlah
	1	2	3	
Berusaha sendiri	394 249	152 164	805 792	1 352 205
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	600 067	49 025	353 764	1 002 856
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	70 114	47235	100 108	217 457
Buruh/Karyawan/Pegawai	396 244	611 343	1 537 845	2 545 432
Pekerja bebas	299 280	191 958	130 702	621 940
Pekerja keluarga/tak dibayar	664 092	66 765	1 102 362	1 102 362
<b>Jumlah</b>	<b>2 424 046</b>	<b>1 118 490</b>	<b>4 030 573</b>	<b>6 842 252</b>

*Keterangan:*

1. Pertanian

2. Industri Pengolahan

3. jasa

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020



Dapat dilihat pada tabel 4.3 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama yang paling banyak adalah dibidang jasa yaitu sebesar 4.030.573 jiwa, di ikuti dengan bidang pertanian sebesar 2.424.046 jiwa. 1.118.490 jiwa merupakan bidang yang terkecil yaitu di bidang Industri pengolahan. Tetapi jika dilihat dari status pekerjaan, penduduk yang berusaha sendiri yang paling banyak adalah dibidang jasa yaitu sebesar 805.792 jiwa, diikuti dengan bidang pertanian sebesar 394.294 dan yang paling sedikit yaitu bidang Industri Pengolahan sebesar 152.164 jiwa. Pada penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar yang paling banyak yaitu pada bidang pertanian sebesar 600.067 jiwa, diikuti oleh bidang Jasa yaitu sebesar 353.764 jiwa dan yang paling sedikit yaitu dibidang Industri Pengolahan dengan jumlah 49.025 jiwa. Penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar yang paling banyak adalah pada bidang Jasa yaitu sebesar 100.108 jiwa, dan di ikuti oleh bidang Pertanian sebesar 70.114 jiwa, 47.235 jiwa merupakan bidang yang paling sedikit. Pada buruh, karyawan, pegawai yang banyak adalah dibidang Jasa sebesar 1.537.845 jiwa, diikuti oleh bidang Industri Pengolahan yaitu sebesar 611.343 jiwa, dan yang paling sedikit adalah dibidang pertanian sebesar 396.244 jiwa. Pada pekerja bebas yang paling banyak adalah dibidang pertanian sebesar 299.280 jiwa, diikuti oleh bidang Industri Pengolahan sebesar 191.985 jiwa dan yang paling sedikit adalah bidang jasa yaitu sebesar 130.702 jiwa. Dan yang terakhir adalah penduduk pekerja keluarga atau tidak dibayar yang paling banyak adalah dibidang jasa yaitu sebesar 1.102.362 jiwa dan di ikuti oleh bidang pertanian sebesar 664.092 jiwa dan yang paling sedikit adalah bidang Industri Pengolahan sebesar 66.765 jiwa.

#### **4.1.4 Kondisi Ekonomi**

##### **A. Nilai PDRB**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan jumlah produksi yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang merupakan suatu gambaran tingkat perubahan ekonomi suatu daerah. Bagi suatu daerah hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dicapai dan dapat digunakan sebagai alat menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut ini tabel PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020

**Tabel 4.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**  
**dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (miliar**  
**rupiah) provinsi Sumatera Utara**

Lapangan Usaha (1)	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	Triw II-2019 (2)	Triw III-2019 (3)	Triw II-2019 (4)	Triw III-2019 (5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40 401 484,16	41 905 239,93	33 071 023,81	34 304 267,38
B. Pertambangan dan Penggalian	2 487 492,54	2 597 040,80	1 755 498,20	1 804 658,46
C. Industri Pengolahan	37 417 670,70	38 531 333,34	23 976 232,58	24 732 545,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	225 382,91	228 628,11	180 652,71	183 260,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	198 775,93	201 470,88	128 863,18	130 602,83
F. Konstruksi	28 008 166,47	28 944 833,03	17 054 123,55	17 593 033,85
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37 514 979,01	39 237 873,58	23 996 975,25	24 757 079,83
H. Transportasi dan Pergudangan	10 065 192,42	10 334 899,83	6 399 746,44	6 557 164,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4 799 921,19	4 907 898,99	3 273 156,11	3 341 757,81
J. Informasi dan Komunikasi	4 213 337,10	4 377 285,00	3 808 595,10	3 911 808,03
K. Jasa Keuangan	5 822 680,28	5 846 169,20	3 770 398,48	3 795 235,71
L. Real Estat	10 057 652,10	10 462 206,48	5 685 549,38	5 788 491,80
M, N. Jasa Perusahaan	2 118 201,63	2 247 672,17	1 227 083,83	1 258 129,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 477 114,61	7 530 821,07	4 391 634,99	4 515 918,26
P. Jasa Pendidikan	3 605 497,38	3 767 662,81	2 712 504,69	2 773 536,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 982 638,46	2 073 714,33	1 283 193,98	1 315 787,10
R, S, T, U. Jasa Lainnya	1 154 401,88	1 203 604,96	696 197,61	709 982,33
<b>PDRB</b>	<b>197 550 588,78</b>	<b>204 398 354,49</b>	<b>133 391 429,90</b>	<b>137 473 259,25</b>

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dari tabel PDRB Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat kita lihat jumlah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan II tahun 2019 totalnya mencapai 197 550 588,78 miliar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Triwulan II tahun 2019 total mencapai 133 391 429,90 miliar. Kemudian Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan III tahun 2019 totalnya mencapai 204 398 354,49 miliar, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010(ADHK) pada triwula III tahun 2019 totalnya mencapai 137 473 259,25 miliar.

Berdasarkan data di atas PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 distribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang lebih mendominasi di provinsi sumatera utara dengan jumlah harga berlaku sebesar Rp 41.905.239,93 dan harga konstan Rp34.304. 267,38 dan di urutan kedua distribusi industri pengolahan jumlah harga berlaku sebesar Rp

38.531.333,34 dan dengan harga konstan Rp 24.732.545,96. Sedangkan distribusi yang paling rendah adalah distribusi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai harga berlaku sebesar Rp 201.470,88 dan harga konstan Rp 130.602,83.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut tabel laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Harga Konstan 2010.

## B. PDRB Perkapita

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2017 – 2019**

Rincian	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
<b>I Atas Dasar Harga Berlaku</b>			
- Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta rupiah)	48	51.46	55.05
<b>II Atas Dasar Harga Konstan 2010</b>			
- Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta rupiah)	34.18	35.57	37.05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara

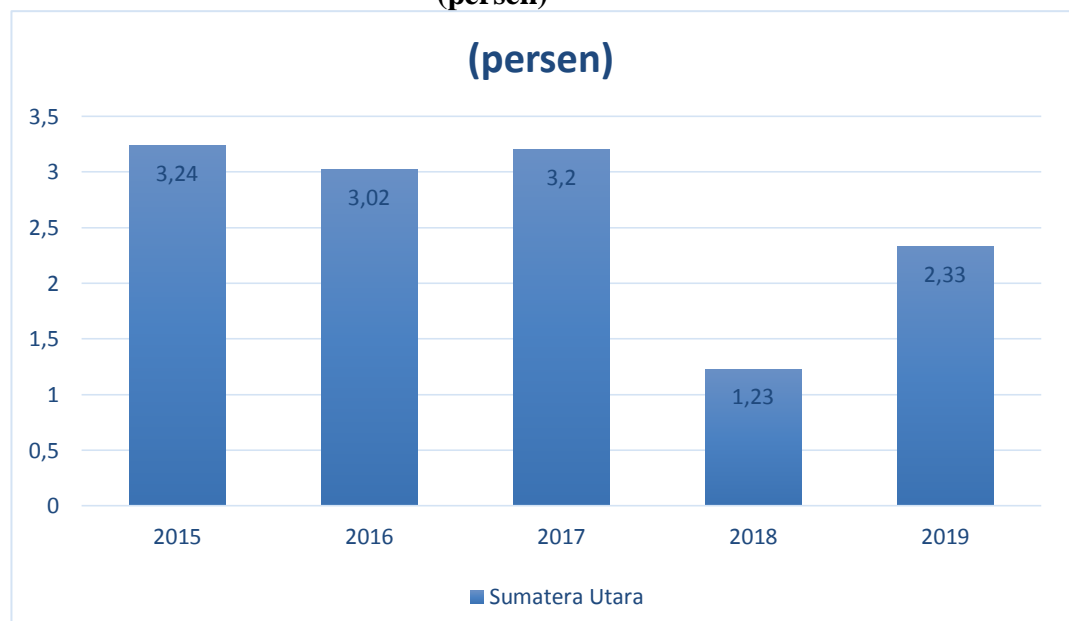
<sup>1)</sup>Proyeksi Penduduk 2010-2035

PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 48 juta rupiah dan meningkat menjadi 55,05 juta rupiah pada

tahun 2019. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2017-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Pada Tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan mencapai 37,05 juta rupiah.

### C. Inflasi

**Grafik 4.1**  
**Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019**  
(persen)



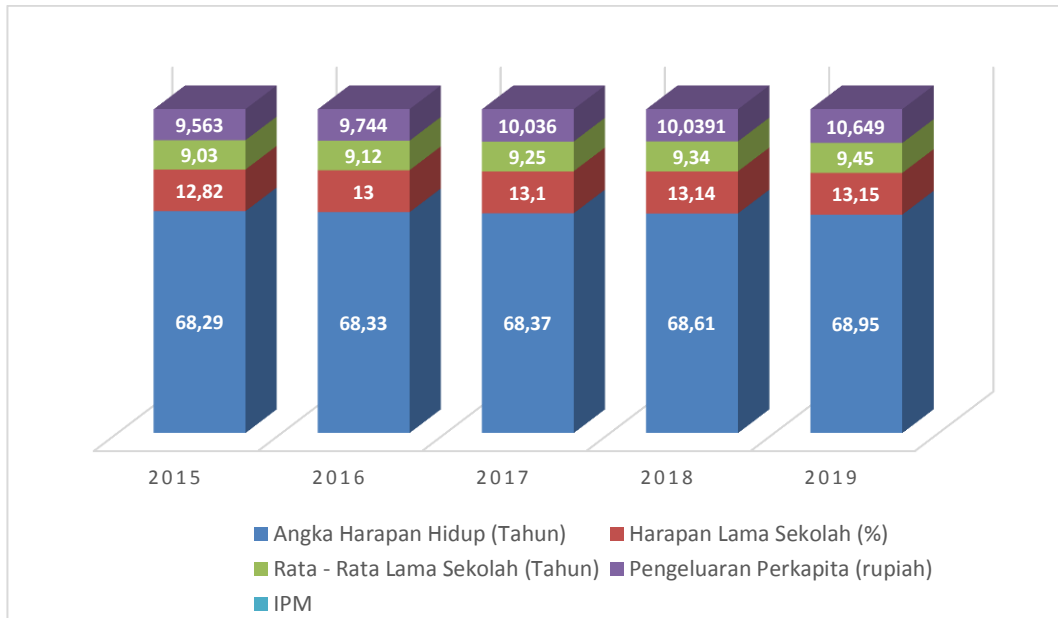
Sumber : [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)

Dapat dilihat pada grafik 4.1 bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 3,24 persen, kemudian pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan, dari 3,24 persen menjadi 3,02 persen. Kemudian pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan kembali sebesar 3,20 persen, dan pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 1,23 persen dan pada tahun 2019 inflasi mengalami peningkatan kembali sebesar 2,33 persen.

#### **4.1.5 Kondisi Sosial Provinsi Sumatera Utara**

##### **A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

**Grafik 4.2**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi**  
**Sumatera Utara Tahun 2015-2019**



Sumber : [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)

Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2015 - 2019, dari tahun ke tahun angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan seperti dari tahun 2015 sebesar 68,29 tahun menjadi sebesar 68,33 tahun pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 68,95 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara cukup rendah yaitu pada tahun 2019 hanya 9,45 tahun dan tahun 2018 sebesar 9,34 tahun.

Berarti pada tahun 2019, rata – rata penduduk Provinsi Sumatera Utara yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengecap bangku pendidikan formal selama 9,45 tahun. IPM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk IPM Provinsi Sumatera Utara peningkatannya cukup signifikan pada tahun 2015 hanya sebesar 69,51 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 71,74 .

## B. Gini Ratio

**Gambar 4.1**  
**Perkembangan *Gini Ratio* Sumatera Utara, September 2012 – Maret 2019**



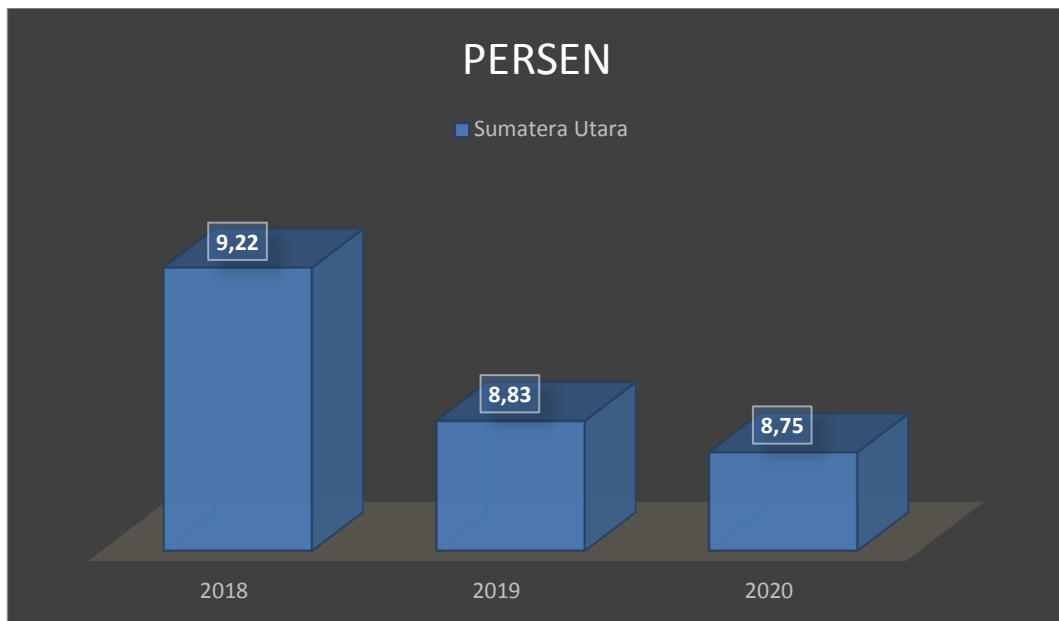
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ([sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id))

*Gini Ratio* Sumatera Utara pada September 2012 tercatat sebesar 0,331. Selama periode September 2012 hingga Maret 2019, nilai *Gini Ratio* cukup berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2013 yaitu sebesar 0,354. Periode selanjutnya turun hingga mencapai 0,310 pada September 2014, kemudian mengalami peningkatan kembali pada Maret 2015 menjadi 0,336 dan menurun kembali hingga mencapai angka 0,312 pada September 2016, akan tetapi mengalami peningkatan kembali menjadi 0,315 pada Maret 2017 dan menjadi 0,335 pada September 2017. *Gini Ratio* Sumatera Utara pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,318 turun menjadi 0,311 pada September 2018, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 0,317 pada Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,338. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,330. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2019 tercatat sebesar 0,264. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,257.

### C. Kemiskinan



**Grafik 4.3**  
**Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 -2019**



Sumber : [www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)

Dapat dilihat pada grafik di atas pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,22 persen, dan tahun 2019 tingkat kemiskinannya sebesar 8,83 persen dan di tahun 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,75 persen

## **4.2 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan**

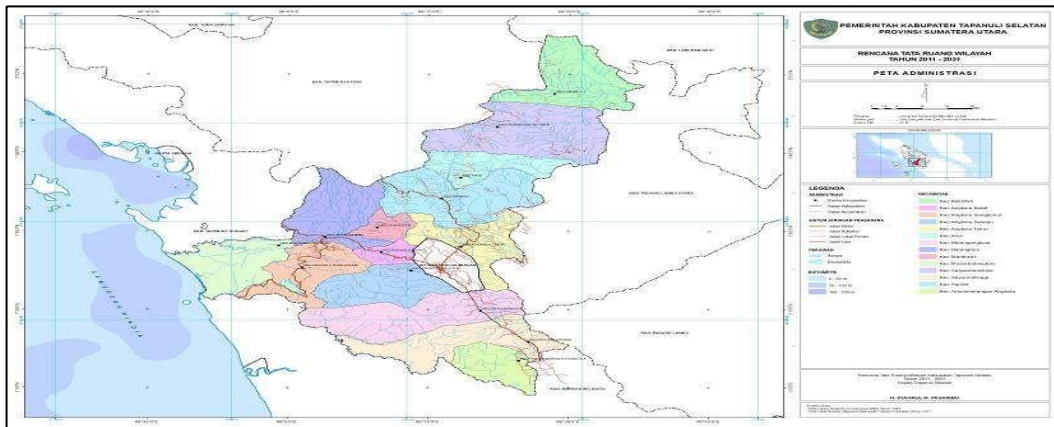
### **4.2.1 Letak Geografis**

Secara umum Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada  $0^{\circ}58'35''$  -  $2^{\circ}07'33''$  LU dan  $98^{\circ}42'50''$  -  $99^{\circ}34'16''$  BT. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal;

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal.

**Gambar 4.2 Peta Kabupaten Tapanuli Selatan**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas total sebesar 444.482,30 Ha, yang terdiri dari 14 kecamatan, 36 kelurahan dan 212 desa. Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibu kota Sipirok adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara berada di antara Medan (ibu kota Propinsi Sumatera Utara) dan Padang (ibukota Sumatera Barat). Berdasarkan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Perda No.5 Tahun 2011 maka jumlah Desa dari 493 berubah menjadi 211 desa, jumlah kelurahan dari 10 berubah menjadi 37 kelurahan.

**Tabel 4.6**

**Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan Dan Jumlah kelurahan Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Luas
----	----------------	--------	------

		Kelurahan/Desa	Wilayah	
			(Ha)	% Terhadap Total
1	Batang Angkola	36	47,304	10.64
3	Angkola Timur	15	27,340	6.15
4	Angkola Selatan	17	29,167	6.56
5	Angkola Barat	14	7,410	1.67
6	Batang Toru	23	35,149	7.91
7	Marancar	12	8,688	1.95
8	Sipirok	40	46,175	10.39
9	Arse	10	20,809	4.68
10	Saipar Dolok Hole	14	54,785	12.33
11	Aek Bilah	12	39,232	8.83
12	Muara Batang Toru	9	41,700	9.38
13	Tano Tombangan Angkola	17	19,568	4.40
14	Angkola Sangkunur	10	29,500	6.64
	<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>444,482</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS, Tapanuli Selatan 2020

Berdasarkan luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah Kecamatan Batang Angkola dengan luas 47,304km<sup>2</sup> atau sekitar 10,64 persen dari total luas Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti Kecamatan Sipirok dengan luas 46,175Km<sup>2</sup> atau 10,39 persen. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Batang Angkola Barat dengan luas 7,410km<sup>2</sup> atau sekitar 1,67 persen dan diikuti oleh Kecamatan Marancar dengan luas 8,688 atau 1,95 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 4.2.2 Kondisi Iklim dan Topografi

### A. Iklim

Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada Bulan Desember terjadi curah hujan tertinggi (2.028 mm) dan terendah di Bulan Juni (348 mm).

## **B. Topografi**

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berada di ketinggian antara 0 – 2009 mdpl. Daerah yang berada pada ketinggian 0 meter umumnya terdapat di daerah pantai barat Tapanuli Selatan, yaitu di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Untuk daerah yang berdiri pada ketinggian 2.009 meter terdapat pada Gunung Tapulomajung di Kecamatan Saipar Dolok Hole. Keadaan Topografis Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari Dataran Rendah, Bergelombang, Berbukit dan Bergunung. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Gongonan di Kecamatan Batang Angkola, Gunung Lubuk Raya di Kecamatan Angkola Barat dan Gunung Sibualbuali di Kecamatan Sipirok. Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dibagi dalam 4 (empat) kawasan yaitu :

- a. Kawasan Gunung dan perbukitan sebagian besar adalah jalur pergunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung (kemiringan diatas 40%) yang harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan gunung dan perbukitan terdapat di sebagian besar Kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah.
- b. Kawasan bergelombang hingga berbukit (kemiringan 15 - 40%) merupakan kawasan potensial untuk Pertanian dan Perkebunan Rakyat meliputi Kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, BatangToru.
- c. Kawasan Landai sampai bergelombang (kemiringan 2 - 15%) adalah kawasan

pertanian dan perkebunan besar meliputi Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Kecamatan Batang Toru.

- d. Kawasan Dataran (kemiringan 0 - 2%) sebagian besar merupakan lahan sawah, padang rumput yang potensial sebagai kawasan penggembalaan ternak yang meliputi Kecamatan Batang Angkola dan sebagian Dataran adalah merupakan Kawasan Pantai dengan garis Pantai sepanjang  $\pm$  35 km yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Batang Toru merupakan Kawasan Potensial bagi pengembangan usaha tambak dan perikanan darat serta potensi pariwisata.

#### 4.2.2 Kondisi Demografi

##### A. Penduduk

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan (jiwa), 2019**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Batang Angkola	10140	10939	21079
2	Sayur Matinggi	12259	12667	24926
3	Tano Tombangan Angkola	7138	7789	14927
4	Angkola Muara Tais	6514	6801	13315
5	Angkola Timur	9521	10027	19548
6	Angkola Selatan	15362	13475	28837
7	Angkola Barat	12489	12919	25408
8	Angkola Sangkunur	9739	9580	19319
9	Batang Toru	16442	17193	33635
10	Marancar	4822	4812	9634
11	Muara Batang Toru	6219	5862	12081
12	Sipirok	15625	15907	31532
13	Arse	3966	4119	8085

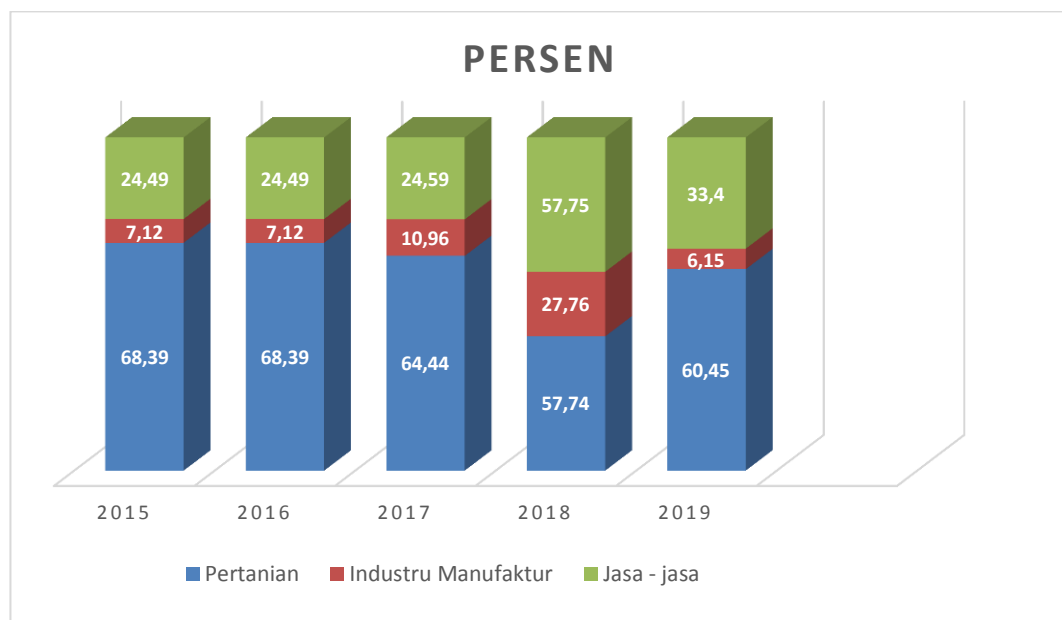
14	Saipar Dolok Hole	6546	6505	13051
15	Aek Bilah	3352	3202	6556
	Total	140134	140134	281931

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2019 tercatat 281.931 jiwa dengan rincian 140.134 jiwa penduduk laki-laki dan 140.134 jiwa penduduk perempuan. Maka diatas bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Batang Toru dengan jumlah penduduknya 33.635 jiwa. Dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah peduduknya adalah Aek Bilah dengan 8.085 jiwa.

## B. Tenaga Kerja

**Grafik 4.14**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**  
**Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di**  
**Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015-2019**



Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Dapat dilihat pada Grafik 4.4 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yang paling banyak adalah dibidang

pertanian. Tetapi jika dilihat dari tahun pertahun jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian semakin menurun di tahun 2015 - 2018, pada tahun 2015 jumlah pekerja dibidang pertanian sebesar 68,39 persen, dan menurun sebesar 57,75 persen tahun 2019, hal ini disebabkan karena lahan yang berkurang dan turunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian karena produktivitas yang mengalami peningkatan. Jika produktivitas meningkat, maka tenaga manusia akan digantikan dengan mesin sehingga otomatis akan mengurangi tenaga kerja, tetapi pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 60,45 persen. Jika dilihat dari bidang industri manufaktur dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah pekerja dibidang industri manufaktur sebesar 7,12 persen dan mengalami kenaikan sebesar 27,76 persen di tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industry manufaktur mengalami penurunan drastis sebesar 6,15 persen. Pada bidang jasa- jasa pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan. Di tahun 2015 jumlah tenaga kerja dibidang jasa-jasa sebesar 24,29 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 57,75 persen. Tetapi pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja di bidang jasa – jasa mengalami penurunan sebesar 33,40 persen.

### **4.2.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan**

#### **A. Nilai PDRB**

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan salah satu langka awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan, caranya dengan distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong ditrisbusi yang

lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

**Tabel 4.8**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan (miliar rupiah) 2015-2019**

	Lapangan Usaha Industri	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3 608,68	3 713, 35	3 899,61	4 058, 97	4 273, 11
B	Pertambangan dan Penggalian	1 1 45,15	1 187,65	1 210,37	1 246,30	1 237,58
C	Industri Pengolahan	510,06	531,65	542,80	573,07	601,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	5,07	5,40	5,76	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,95	6,35	6,84	7,22	7,62
F	Konstruksi	789,86	867,57	940,40	1 021, 47	1 109,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	812,70	889,53	962,86	1 027,95	1 096,77
H	Transportasi dan Pergudangan	110,34	117,53	127,84	136,22	145,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,73	109,94	118,95	128,23	138,28
J	Informasi dan Komunukasi	47,88	51, 60	56,02	60,77	65,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	69,59	71,25	72,66	75,04	77,40
L	Real estate	144,78	156,90	166,65	178,03	189,78
M,N	Jasa Perusahaan	3,89	4,12	4,43	4,68	4,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	440,87	480,16	502,40	537,66	579,22
P	Jasa pendidikan	54,58	58,38	62,47	66,87	71,57
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	58,85	61,04	65,70	70,76	76,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,44	2,60	2,79	2,96	3,16
	PDRB ADHK	7 910,01	8 314,69	8 748,18	9 201, 96	9 683,66

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))



Tabel 4.8 menggambarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2019. Berdasarkan Tabel di atas selama kurun waktu tahun 2015-2019 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi hampir setengah dari total keseluruhan PDRB di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 3.608,68 miliar, mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.713,35 miliar di tahun 2016. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 3.899,61 miliar, meningkat menjadi Rp. 4.058,97 miliar di tahun 2018 dan pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 4.273,11 miliar.

Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang lumayan meningkat dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.145,15 miliar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan, meningkat menjadi Rp. 1.187,65 miliar di tahun 2016. Pada tahun 2017 sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 1.210,37 miliar, meningkat sebesar Rp. 1.246,30 miliar di tahun 2018, tetapi di tahun 2019 sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit penurunan sebesar Rp. 1.237,58 miliar. Selanjutnya sektor yang

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sementara itu, sektor lain di luar dari ke empat sektor yang telah disebutkan di atas mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut tabel laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Harga Konstan 2010.

## B. PDRB Perkapita

**Tabel 4.9**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2015-2019 (ribu rupiah)**

Tahun	Tapanuli Selatan	
	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan(%)
2015	28.753,43	4,11
2016	30.028,96	4,44
2017	31.401,97	4,57
2018 <sup>*)</sup>	32.830,96	4,55
2019 <sup>**)</sup>	34.347,62	4,64

*Keterangan: \*) : Angka Sementara*

*\*\*): Angka Sangat Sementara*

*Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019*

PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Selatan atas dasar harga konstan mencapai 34,35 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Selatan tumbuh sebesar 4,11 persen, sedangkan

tahun 2019 tumbuh sebesar 4,62 persen.

### C. Inflasi Kabupaten Tapanuli Selatan

**Tabel 4.10**

**Laju Inflasi Kumulatif Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015-2019 (persen)**

Tahun	Laju Inflasi Kumulatif (%)
2015	1.66
2016	4.28
2017	3.82
2018	2.22
2019	2.15

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Tingkat inflasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dihitung berdasarkan harga di Pasar Sipirok. Pasar Sipirok diambil sebagai sampel karena Pasar Sipirok merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

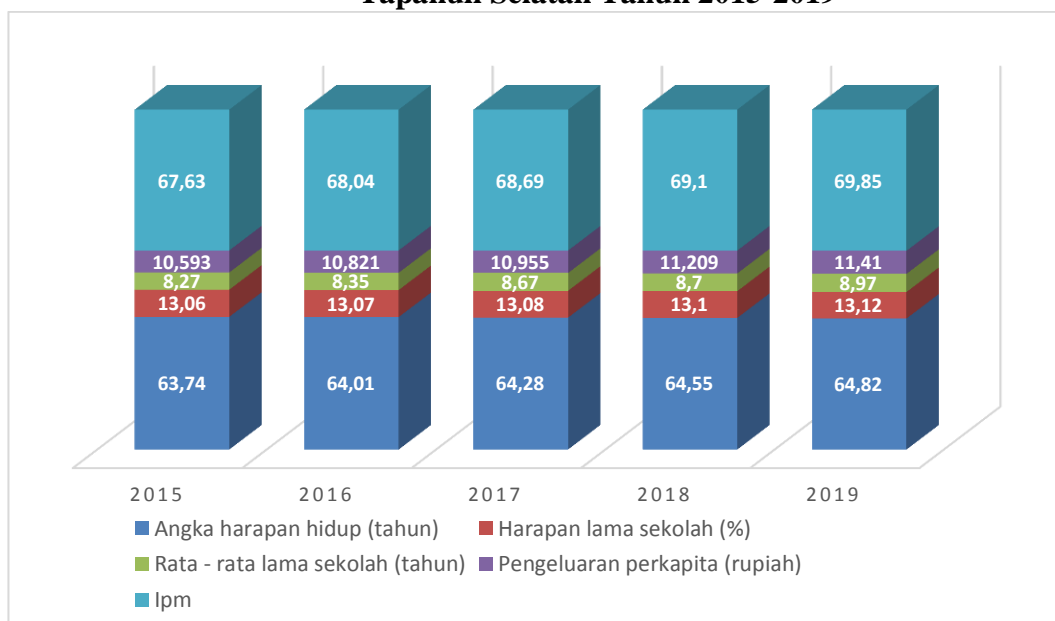
Dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa perkembangan inflasi di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 sebesar 1,66 persen, kemudian pada tahun 2016 inflasi mengalami kenaikan yang tinggi, dari 1,66 persen menjadi 4,28 persen. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis, pada tahun 2017 inflasi Tapanuli Selatan sebesar 3,82 persen dan 2,15 persen di tahun 2019.

#### 4.2.4 Kondisi Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan

##### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik 4.5

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019



Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

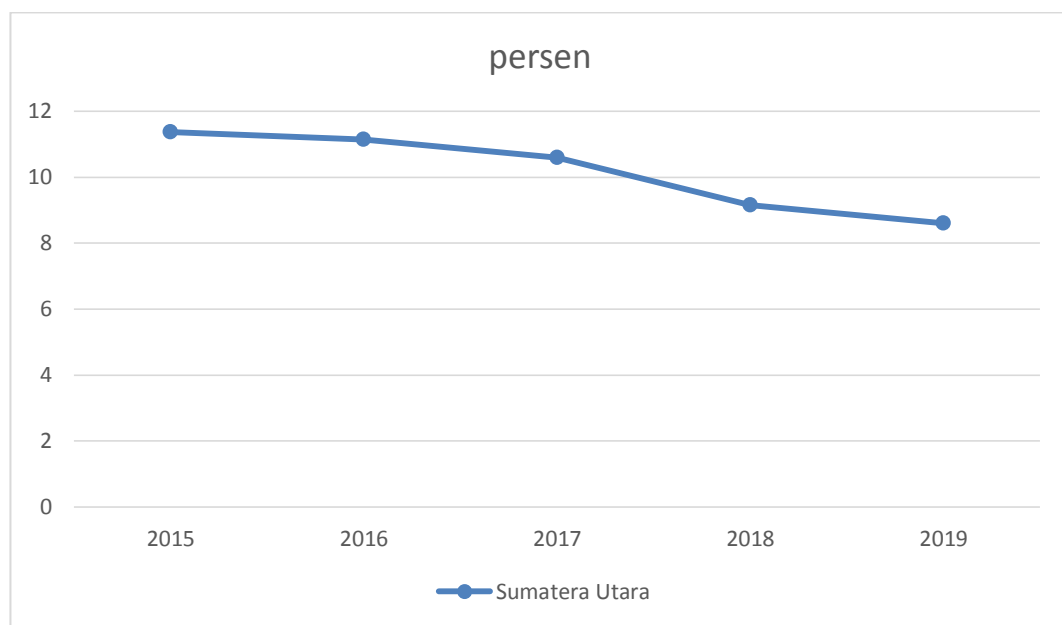
Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tahun 2015 - 2019, dari tahun ke tahun angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan seperti dari tahun 2015 sebesar 63,74 tahun menjadi sebesar 64,01 tahun pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 64,82 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup rendah yaitu pada tahun 2019 hanya 8,97 tahun dan tahun 2018 sebesar 8,70 tahun. Berarti pada tahun 2019, rata – rata penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengecap bangku pendidikan formal selama

8,97 tahun. IPM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk IPM Kabupaten tapanuli Selatan peningkatannya cukup signifikan pada tahun 2015 hanya sebesar 67,63 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 68,85.

## B. Kemiskinan

Grafik 4.6

### Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber : [www.tapsel.bps.go.id](http://www.tapsel.bps.go.id)

Dalam Grafik 4.6 dapat dilihat angka kemiskinan di Tapanuli Selatan pada tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebesar 11,37 persen, tahun 2016 sebesar 11,14 persen mengalami penurunan sebesar 0,23 persen, tahun 2017 sebesar 10,60 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,54 persen, di tahun 2018 sebesar 9,16 persen menurun sebesar 1,44 persen dan tahun 2019 sebesar 8,60 persen mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.

## 4.3 Analisa Model Estimasi Tentang Dana Desa

### 4.3.1 Perkembangan Dana Desa

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**Tabel 4.11**

**Rincian Dana Desa Per Kabupaten Se-Sumatera Utara (Ribuan Rupiah)**

<b>KABUPATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nias	24.870.203	103.736.501	132.926.248	148.261.931	180.585.127
Mandailing Natal	24.870.821	222.908.920	284.048.518	252.910.057	285.841.420
Tapanuli Selatan	16.507.826	127.063.126	161.670.006	145.856.856	167.751.279
Tapanuli Tengah	10.762.812	96.562.993	123.393.234	121.058.197	140.541.973
Tapanuli Utara	16.871.434	142.031.302	180.698.826	164.129.846	184.186.164
Toba Samosir	8.072.109	136.530.337	173.463.727	154.311.189	176.101.238
Labuhan Batu	5.545.128	48.622.618	62.369.282	60.371.923	70.226.102
Asahan	12.726.298	111.404.032	141.972.561	126.570.894	146.090.415
Simalungun	24.579.935	230.404.778	294.047.540	259.232.136	294.442.204
Dairi	9.744.708	98.210.643	126.096.790	111.910.524	127.172.564
Karo	18.544.034	153.840.310	196.336.126	173.021.882	197.078.926
Deli Serdang	27.634.246	237.763.644	303.060.286	271.906.373	306.386.948
Langkat	17.453.208	151.029.055	192.863.823	178.799.190	205.446.268
Nias Selatan	33.379.260	272.337.292	346.818.470	314.481.751	348.422.333
Humbang Hasundutan	11.126.420	92.610.146	117.513.286	105.690.046	123.336.297
Pakpak Barat	3.781.528	33.755.307	42.483.881	40.948.983	48.298.630
Samosir	8.072.109	78.867.498	100.027.803	90.921.937	108.744.499
Serdang Berdagai	17.235.043	144.302.850	183.489.815	162.911.520	184.774.302
Batu Bara	10.108.316	89.109.409	113.377.356	104.583.228	118.843.171
Padang Lawas Utara	28.216.020	225.561.557	288.081.911	254.318.741	287.244.660

Padang Lawas	22.034.675	178.229.984	228.176.371	204.748.115	230.097.858
Labuhan Batu Selatan	3.781.528	36.783.045	46.022.462	46.205.735	61.548.371
Labuhan Batu Utara	6.035.901	53.813.253	65.464.939	68.036.521	79.123.527
Nias Utara	8.144.830	72.284.380	91.824.194	110.728.448	137.008.319
Nias Barat	7.999.387	65.419.884	83.734.696	92.269.401	114.000.248

Sumber : Kementerian keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan sampel di atas, Dana Desa paling besar di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 yaitu Kabupaten Nias Selatan dengan total sebesar Rp. 33.379.260 Juta dan Dana Desa yang terendah pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2015 yaitu Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan total sebesar Rp. 3.781.528 Juta. Pada tahun 2016 Kabupaten Nias Selatan juga sebagai penerima Dana Desa Terbesar di Provinsi Sumatera utara dengan total sebesar Rp. 272.337.292 Juta, sedangkan penerima Dana Desa terendah di tahun 2016 yaitu Kabupaten Pakpak Barat sebesar Rp. 33.755.307 Juta.

Kabupaten Nias Selatan tetap menjadi Penerima Dana Desa tertinggi di Tahun 2017 sebesar Rp. 346.818.470 Juta dan Dana Desa terendah di tahun 2017 adalah Kabupaten Pakpak Barat dengan total Rp. 42.483.881 Juta. Dilihat pada tahun 2018 dan tahun 2019 Kabupaten Nias Selatan tetap menjadi penerima Dana Desa terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan total sebesar Rp. 314.481.751 Juta dan Rp. 348.422.333 Juta dan yang menjadi penerima Dana Desa terendah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Kabupaten Pakpak Barat dengan total sebesar Rp. 40.948.983 Juta dan Rp. 48.298.630 Juta.

Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’ diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka

Kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendorong perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah pedesaan. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan .

#### 4.3.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Statistik Deskriptif**

	DD	JPD	JSFS	JSFKES	JD	TK	IPD
Mean	82760954	421240.0	289.2800	139.0200	216.0600	11.77380	55.75100
Median	37164122	302445.5	240.0000	109.0000	208.0000	10.03000	56.14000
Maximum	3.14E+08	2155625.	601.0000	472.0000	461.0000	29.28000	67.49000
Minimum	3781528.	44520.00	82.00000	29.00000	52.00000	4.130000	38.92000
Std. Dev.	86214502	412377.7	143.1985	104.6733	112.2774	5.425098	8.219597
Skewness	1.030365	2.725669	0.816174	1.304064	0.437282	1.995868	-0.403010
Kurtosis	2.992678	11.15812	2.690972	4.002844	2.153635	6.572141	2.047604
Jarque-Bera	8.847220	200.5667	5.750125	16.26672	3.085826	59.77948	3.243180
Probability	0.011991	0.000000	0.056413	0.000294	0.213758	0.000000	0.197584
Sum	4.14E+09	21062002	14464.00	6951.000	10803.00	588.6900	2787.550
Sum Sq. Dev.	3.64E+17	8.33E+12	1004784.	536869.0	617704.8	1442.153	3310.527
Observations	50	50	50	50	50	50	50

Sumber: *Eviews 10 dan diolah*

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwasannya dalam rentang 2014 dan 2018, nilai mean dari Dana Desa (DD) Kabupaten berdasarkan



sampling di Sumatera Utara sebesar 82760954 artinya bahwa pertahun DD bernilai Rp. 82.760.954. Nilai mean dari variabel Jumlah Penduduk Desa (JPD) sebesar 421240 artinya bahwa pertahun JPD sebesar 421.240 jiwa. Nilai mean dari variabel Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS) sebesar 289.2800 artinya bahwa pertahun JSFS sebanyak 289.280 unit. Nilai mean dari variabel Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES) sebesar 139.0200 artinya bahwa pertahun JSFKES sebanyak 139.020 unit. Nilai mean dari variabel Jumlah Desa (JD) sebesar 216.0600 artinya bahwa pertahun JD sebanyak 216.060 desa. Nilai mean dari variabel Tingkat Kemiskinan (TK) sebesar 11,77380 artinya bahwa pertahun TK sebanyak 11,77%. Dan adapun nilai mean dari variabel Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 55,75100 artinya bahwa pertahun IPD sebanyak 55,75%.

#### 4.3.3 Hasil Analisis Regresi

**Tabel 4.13**  
**Hasil Pengolahan Data Model Estimasi**

Variabel	OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	
	Model tanpa REM	Model Setelah REM
Konstanta	-7.16E+08	-7.16E+08
	(-3.999060)	(-5.766243)
JPD	65.60375	65.60375
	(1.266329)	(1.825919)
JSFS	-95907.93	-95907.93
	(-0.471820)	(-0.680316)
JSFKES	-742660.8**	-742660.8**
	(-2.738730)	(-3.948974)
JD	963199.7**	963199.7**
	(4.320043)	(6.229068)
TK	8980153**	8980153**
	(3.116526)	(4.493717)
IPD	10560691**	10560691**
	(4.031987)	(5.813720)
Numb of Obs	50	50
Adj R-Squared	0.425275	0.425275
R ( <i>Correlation</i> )	0.495650	0.495650
Uji-F	7.043031**	7.043031**
	(0.000029)	(0.000029)

D-W ( <i>Durbin Watson</i> )	2.817466	2.817466
------------------------------	----------	----------

Keterangan: *Level of Signifikan, \*\*5%*

Sumber: *Eviews 10 dan diolah*

Dari hasil regresi diatas, sama-sama ditemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga diduga dengan perlu dilakukannya *Random Effect Model* (REM). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waku dan antar subjek. Penggunaan *Random Effect Model* (REM) tetap meningkatkan kualitas regresi. Seluruh variabel penjelas (independen) mengalami peningkatan dampak pengaruh dan signifikansi statistik.

#### 4.3.4 Penaksiran

##### 1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan model estimasi yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi DD Kabupaten se-Sumatera Utara setelah dilakukan uji regresi dapat dilihat bahwa  $R^2$  adalah sebesar 42,52%, artinya secara bersama-sama variabel JPD, JSFKS, JSFKES, JD, TK dan IPD memberikan variasi penjelasan terhadap dana desa. Sedangkan nilai 57,48% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

##### 2) Korelasi

Dari hasil regres pada model estimasi variabel-variabel yang mempengaruhi DD Kabupaten se-Sumatera Utara diperoleh nilai R sebesar 49,56%, artinya variabel bebas JPD, JSFKS, JSFKES, JD, TK dan IPD dapat menjelaskan variabel terikat DD secara signifikan.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 0,05 atau tingkat kesalahan  $\alpha 5\%$ .

#### 4.3.5 Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil regresi *Random Effect Model* (REM) sebagai berikut:

$$\text{DDrt} = -7.16 + 65.60 \text{ JPDrt} + (-95.90) \text{ JSFKSrt} + (-74.26) \text{ JSFKESrt} + 96.31 \text{ JDrt} + 89.80 \text{ TKrt} + 10.56 \text{ IPDrt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui regres ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel JPD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel JPD lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha 5\%$  yaitu 65.60%. Artinya, apabila nilai JPD dinaikkan sebesar 1 jiwa, maka akan menaikkan JPD sebesar 65.60 (*ceteris paribus*).
- b. Bahwa variabel JSFS mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel JSFS lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha 5\%$  yaitu -95.90%. Artinya, apabila JSFS dinaikkan 1 unit, maka akan mengurangi nilai DD sebesar 95.90 (*ceteris paribus*).
- c. Bahwa variabel JSFKES mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel JSFKES lebih kecil ( $<$ )

dari  $\alpha$  5% yaitu -74.26%. Artinya, apabila JSKES dinaikkan 1 unit, maka akan mengurangi nilai DD sebesar 74,26 (*ceteris paribus*).

- d. Bahwa variabel JD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel JD lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu 96.31%. Artinya, apabila JD dinaikkan 1 desa, maka akan menaikkan nilai DD sebesar 96.31 (*ceteris paribus*).
- e. Bahwa variabel TK mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel TK lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu 89.80%. Artinya, apabila TK dinaikkan 1 persen, maka akan menaikkan nilai DD sebesar 89.80% (*ceteris paribus*).
- f. Bahwa variabel IPD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dana Desa (DD), sebab nilai koefisien variabel IPD lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu 10.56%. Artinya, apabila IPD dinaikkan 1 persen, maka akan meningkatkan nilai DD sebesar 10,56% (*ceteris paribus*).

#### **4.3.6 Konstanta dan Interpretasi**

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi DD Kabupaten se-Sumatera Utara, terdapat nilai konstanta sebesar -7,16 yang bernilai negatif. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Jumlah Penduduk Desa (JPD)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel JPD adalah 65.60 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaten se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 1.82$  dan nilai *probability* 0.0748 (diatas  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan JPD dengan DD adalah

negatif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai JPD naik maka akan meningkatkan DD sebesar 65.60% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel JPD terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis ditolak.

## **2) Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel JSFS adalah -95.90 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaten se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = -0.68$  dan nilai *probability* 0.5000 (diatas  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan JSFS dengan DD adalah negatif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai JSFS rendah maka akan menurunkan DD sebesar 95.90% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel JSFS terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis ditolak.

## **3) Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel JSFKES adalah -74.26 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaten se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = -3.94$  dan nilai *probability* 0.0003 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan JSFKES dengan DD adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai JSFKES rendah maka akan menurunkan DD sebesar 74.26% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel JSFKES terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis diterima.

## **4) Jumlah Desa (JD)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel JD adalah 96.31 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaen se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 6.22$  dan nilai *probability* 0.0000 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan JD dengan DD adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai JD naik maka akan menaikkan DD sebesar 96.31% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel JD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis diterima.

#### **5) Tingkat Kemiskinan (TK)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel TK adalah 89.80 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaen se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 4.49$  dan nilai *probability* 0.0001 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan TK dengan DD adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai JD naik maka akan menaikkan DD sebesar 89.80% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel JD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis diterima.

#### **6) Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel IPD adalah 10.56 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Desa (DD) Kabupaen se-Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 5.81$  dan nilai *probability* 0.0000 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan IPD dengan DD adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai IPD naik maka akan menaikkan DD sebesar 10.56% dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena

itu, variabel IPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Desa (DD) maka hipotesis diterima.

#### **4.3.7 Uji Statistik**

##### **1) Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)**

Uji-f statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) variabel JPD, JSFS, JSFKES, JD, TK dan IPD Kabupaten se-Sumatera Utara, maka nilai  $F_{tabel}$  sebesar 0.000029 (dibawah  $\alpha$  5%), sedangkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7.04. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dependen.

##### **2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)**

Uji-t statistik bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) variabel JPD, JSFS, JSFKES, JD, TK dan IPD Kabupaten se-Sumatera Utara. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai  $t_{tabel}$  yaitu:

Model:  $df (n) - k = 50 - 6 = 44$ ,  $\alpha = 5\%$  maka nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.68.

#### **4.3.8 Asumsi Klasik**

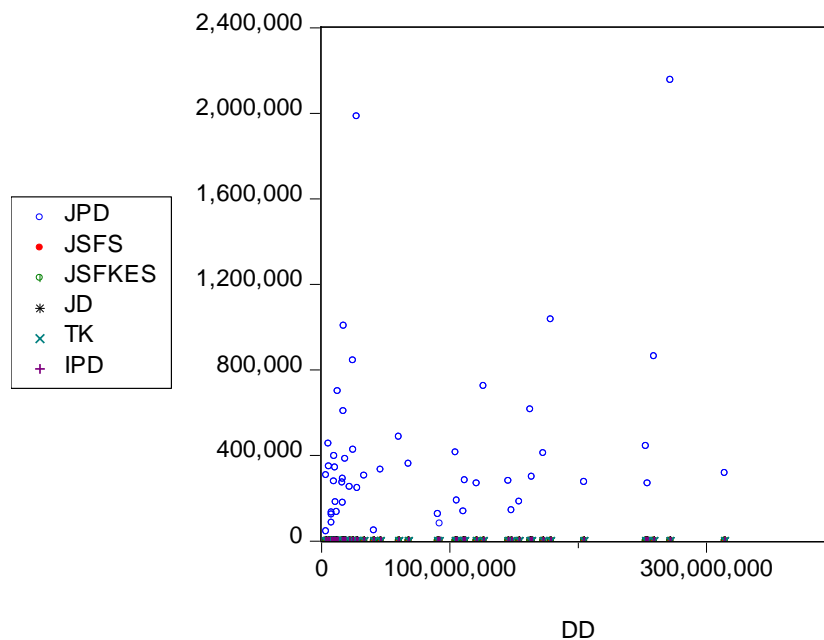
##### **1) Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda

koefisien yang berubah. Ada beberapa variabel dependen yang tidak signifikan terhadap variabel terikat.

## 2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Scatterplot Model**

Sumber: *Eviews 10 dan diolah*

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus dan sejajar serta atas, samping dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model estimasi.



### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *Durbin Watson* (DW) yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model estimasi yang dilakukan dengan uji REM dan setelah melihat uji heterokedastisitas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.817466 artinya pada model digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Dikatakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi, artinya model yang digunakan juga sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga model bisa diestimasi melalui variabel bebas.

### 4) Uji Hausman

Dari hasil uji *Random Effect Model* (REM) maka diperoleh nilai *cross-section random* sebesar 0.0000, nilai *probability*  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah *random effect*, disimpulkan bahwa *random effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.

#### 4.4 Potensi Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan

##### 4.4.1 PDRB (Produk Domestik regional Bruto)

###### A. Kontribusi PDRB

**Tabel 4.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto Nilai dan Kontribusi Atas Dasar Harga**  
**Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**  
**Tahun 2015 dan 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan**

	Lapangan Usaha Industri Origin	2015		2019	
		Nilai (rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (rupiah)	Kontribusi (%)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3 608,68	45,62	4 273,11	44,13
B	Pertambangan dan Penggalian	1 145,15	14,48	1 237,58	12,78
C	Industri Pengolahan	510,06	6,45	601,06	6,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	0,06	6,16	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,95	0,08	7,62	0,08
F	Konstruksi	789,86	9,99	1 109,73	11,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	812,70	10,27	1 096,77	11,33
H	Transportasi dan Pergudangan	110,34	1,39	145,30	1,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,73	1,29	138,28	1,43
J	Informasi dan Komunikasi	47,88	0,61	65,93	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	69,59	0,88	77,40	0,80
L	Real Estate	144,78	1,83	189,78	1,96

M,N	Jasa Perusahaan	3,89	0,05	4,94	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	440,87	5,57	579,22	5,98
P	Jasa Pendidikan	54,58	0,69	71,57	0,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,85	0,74	76,07	0,79
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,44	0,03	3,16	0,03
	PDRB ADHK	7 910,01	100	9 683,66	100

Sumber : [www.tapsel.bps.go.id](http://www.tapsel.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel diatas selama kurun waktu tahun 2015 dan 2019 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi hampir setengah dari total keseluruhan PDRB di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.3 608,68 dengan kontribusi 45,62 persen , mengalami peningkatan menjadi Rp. 4 273,11 di tahun 2019 dan memiliki kontribusi 44,13.

Sektor lain yang memberikan nilai harga konstan yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang lumayan meningkat dari tahun 2015-219. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 1 145,15 dengan kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan, meningkat menjadi Rp. 1 237,58 di tahun 2019 dan memiliki kontribusi sebesar 12,78, karena ini termaksud sektor pertambangan emas yang berkontribusi besar di PDRB Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan Selanjutnya sektor

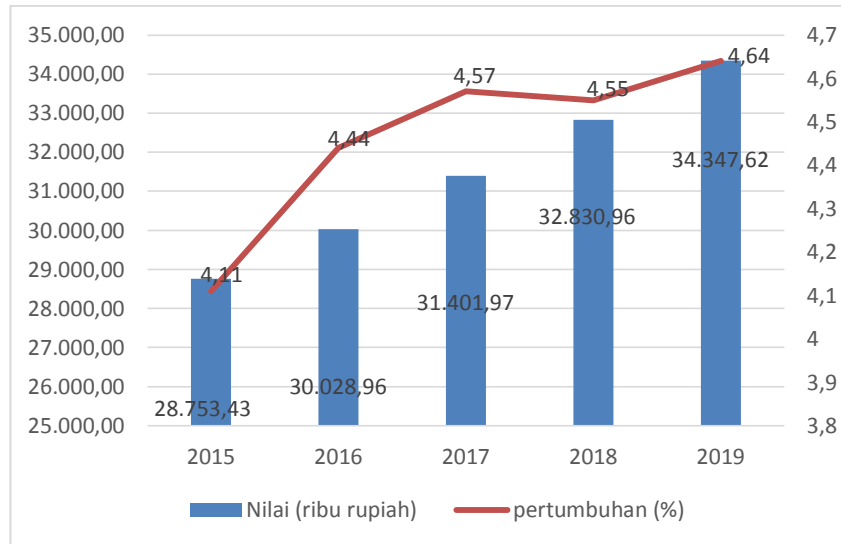
yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sementara itu, sektor lain di luar dari ke empat sektor yang telah disebutkan di atas mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sektor yang paling rendah di tahun 2015 dan 2019 adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 4,66 dengan kontribusi 0,06 persen dan Rp. 6,16 di tahun 2019 dan memiliki kontribusi sebesar 0,06 persen.

### **B. PDRB Perkapita**

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun demikian, diharapkan dengan mengamati perkembangan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **Grafik 4.7**

**PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2015-2019 (ribu rupiah)**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Selatan atas dasar harga konstan mencapai 34,35 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Selatan tumbuh sebesar 4,11 persen, sedangkan tahun 2019 tumbuh sebesar 4,62 persen.

#### 4.4.2 Tenaga Kerja

**Tabel 4.15**

Kontribusi Tenaga Kerja per Sektor Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2019

Tahun	Pertanian		Industri Manufaktur		Jasa - Jasa	
	Tenaga Kerja (%)	Kontribusi (%)	Tenaga Kerja (%)	Kontribusi (%)	Tenaga Kerja (%)	Kontribusi (%)
2015	67,69	45,62	9,69	6,45	22,08	0,03
2016	68,39	44,66	9,69	6,39	22,08	0,03
2017	67,45	44,58	12,38	6,20	20,17	0,03
2018	58,70	44,11	26,93	6,23	14,37	0,03
2019	58,25	44,13	9,51	6,21	32,24	0,03

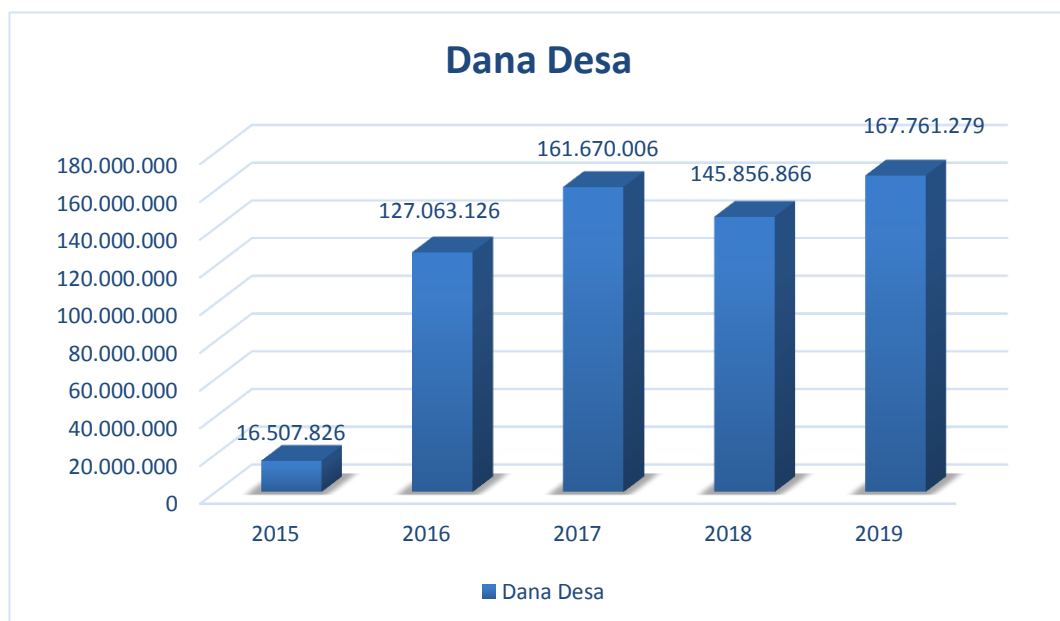
Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 merupakan

sektor terbesar dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu 45,62%, menyerap 67,69% tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, 44,11% merupakan kontribusi sektor pertanian terkecil yang menyerap 58,70% tenaga kerja. Dilihat dari kontribusi sektor Industri Manufaktur pada tahun 2015 merupakan kontribusi terbesar dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 6,45% yang menyerap 9,69% tenaga kerja, sedangkan kontribusi terkecil pada sektor Industri Manufaktur yaitu pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan menyerap 12,38% tenaga kerja. Sedangkan pada sektor jasa-jasa pada kontribusinya dari tahun 2015-2019 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, tetapi jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang terbesar yaitu di tahun 2019 sebesar 32,24% dan yang terkecil yaitu di tahun 2018 sebesar 14,37% tenaga kerja.

#### 4.4.3 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan

**Grafik 4.18**  
**Perkembangan Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019 (ribuan rupiah)**



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan sampel di atas, Dana Desa paling besar di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 167.761.279 juta dan di ikuti dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 161.670.006 juta. Dana Desa yang terendah pada Kabupaten Tapanuli Selatan di yaitu pada tahun 2015 sebesar 16.507.826 juta, dan diikuti dengan tahun 2016 dan 2018. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 127.063.126 juta dan Rp. 145.856.866 di tahun 2018.

#### **4.5 Perkembangan Potensi Sosial Ekonomi Kecamatan Sipirok**

##### **4.5.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 4 desa dari 34 desa yang ada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut ialah Desa Paranjulu, Desa Paranpadang, Desa Sarogodung dan Desa Marsada. Alasan pemilihan sampel di 4 desa tersebut karena mempunyai kriteria yang pendapatannya lumayan bagus, adanya infrastruktur desa dan mempunyai potensi desa.

Serta untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan maka dilakukan riset menggunakan cara penyebaran beberapa angket ke penduduk sekitar. Apakah data yang diperoleh dari aparatur desa sesuai dengan kenyataan yang ada pada penduduk sekitar. Total angket yang disebar masing-masing desa sebanyak 15 yang diambil menurut penyebaran tempat tinggal penduduk. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar penduduk di desa tersebut mengerti dan paham bahkan ikut serta dengan adanya Dana Desa dan Bumdes yang digunakan untuk membangun desa baik dari segi perekonomian dan Sosial.

##### **4.5.2 Potensi Ekonomi dan Sosial Desa Paranjulu, Desa Paranpadang, Desa Sarogodung dan Desa Marsada**

Berikut ini adalah hasil penelitian penyebaran kuisioner di Desa Paranjulu, Desa Paranpadang, Desa Sarogodung dan Desa Marsada yang melibatkan penduduk desa. Potensi perekonomian yang ada di desa tersebut adalah berupa kopi, cabe, pengolahan pupuk dan tempat wisata desa.

Dari hasil penelitian tersebut dengan jumlah 60 sampel dari 4 desa yaitu Desa Paranjulu, Desa Paranpadang, Desa Sarogodung dan Desa Marsada maka dapat dilihat dari segi jenis kelamin mengenai potensi sosial ekonomi di atas maka kita bisa lihat bahwa jenis kelamin laki – laki yang lebih dominan di bandingkan dengan jenis kelamin perempuan yaitu jenis kelamin laki – laki sebanyak 33 responden dan perempuan sebanyak 27 responden. Artinya dari data yg didapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan laki – laki yang mengembangkan potensi sosial ekonomi di desa tersebut. Pada desa paranjulu bahwa usia yang lebih dominan dalam pengelolaan potensi sosial ekonomi di desa paranjulu yaitu umur 47-60 tahun dibandingkan dengan usia yang lainnya, desa paranpadang yaitu umur 36-46 tahun, desa sarogodung 47-60 tahun dan desa marsada yaitu umur 47-60 tahun. Jenis pekerjaan para responden di 4 desa tersebut yang mendominasi yaitu petani dengan tingkat penghasilan lebih dari 2 juta. Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir para responden dari ke 4 desa tersebut adalah sekolah menengah pertama (SMP).

Desa paranjulu, paranpadang, sarogodung, dan desa marsada mempunyai beberapa potensi ekonomi yaitu pohon kopi, tanaman cabe, pengelolaan pupuk dan tempat wisata desa .Ke 4 desa ini telah melakukan upaya pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa paranjulu, paranpadang, sarogodung, dan desa marsada cukup baik yaitu mengembangkan sesuai potensi dan keadaan desa yaitu



dengan Memanfaatkan sumber daya yang melimpah dari kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk organik, merawat pohon kopi yang ada desa, menanam bibit cabe yang disediakan oleh kepala desa sehingga bisa dijual dan akan menambah pemasukan bagi masyarakat desa dan mengembangkan pariwisata yang ada di desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa BumDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Di setiap desa mempunyai masing masing satu Bumdes. Nama Bumdes desa paranpadang yaitu Bumdes sejahtera dengan usaha tanaman kopi, desa paranjulu yaitu Bumdes setia jaya dengan usaha tanaman kopi dengan mengelolanya sendiri, tanaman cabe, dan pengelolaan pupuk, desa sarogodung yaitu Bumdes terpadu dengan usaha tanaman kopi dan pengelolaan pupuk, tempat wisata desa dan desa marsada yaitu Bumdes nauli bergerak dengan usaha tanaman kopi, tanaman cabe dan pengelolaan pupuk.

Dilihat dari infrastruktur desa paranjulu, paranpadang, sarogodung, dan desa marsada mempunyai beberapa infrastruktur yaitu pada desa paranjulu infrastrukturnya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan untuk akses kendaraan ke kebun atau sawah dan pembangunan pengelolaan air bersih, di desa paranpadang infrastrukturnya yaitu pembangunan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, di desa sarogodung yaitu pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan wisata, pembangunan pengelolaan air bersih dan infrastruktur desa marsada yaitu pembangunan irigasi dan pembangunan jalan usaha tani. Dapat dilihat bahwa sebelum adanya Dana Desa dari pemerintah infrastruktur jalan yang ada di desa masih sangat memprihatinkan karena kurangnya biaya untuk memperbaiki

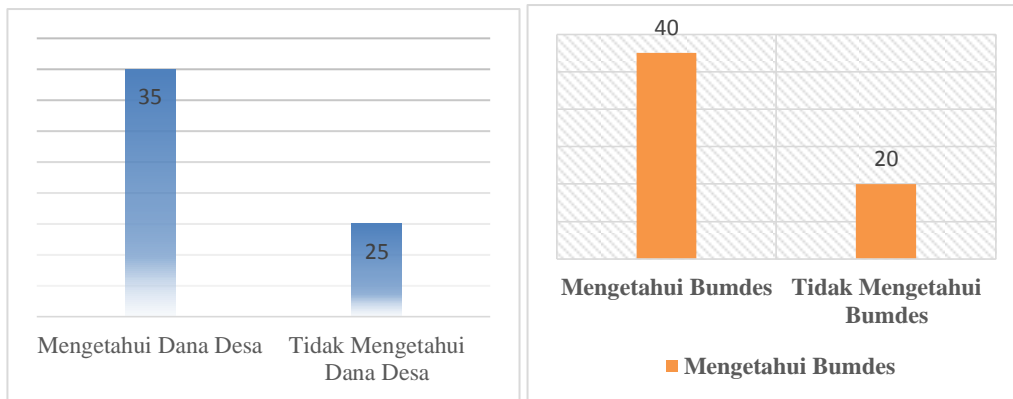
jalan di desa. Tetapi setelah adanya Dana Desa kepala desa mulai memperbaiki sebagian jalan yang tidak memungkinkan yang memang menghambat masyarakat untuk melakukan aktivitas ketika hujan datang karena jalan di desa tersebut akan licin. Di desa paranjulu infrastruktur jalan usaha tani yang diperbaiki mempunyai panjang jalan 1700 meter, desa sarogodung mempunyai infrastruktur jalan usaha tani dengan panjang jalan 3000 meter dan jalan yang belum dibangun sebesar 600 meter, desa marsada mempunyai infrastruktur jalan usaha tani dengan panjang jalan 7700 meter dan desa paranpadang mempunyai infrastruktur jalan sebesar 800 meter.

Dapat dilihat bahwa perkembangan pasar sebelum adanya dana desa dan sesudah adanya dana desa pada ke 4 desa tersebut tidak mengalami perubahan karena pasar di desa tersebut hanya ada satu kali dalam satu minggu, maka dari itu kepala desa tidak memberikan perubahan pada pasar di desa tersebut.

Dapat dilihat dari ke 4 desa yang di teliti bahwa sarana kesehatan yang ada di desa seperti poskede (pos kesehatan desa) hanya ada di desa paranjulu, paranpadang, dan desa sarogodung karena di desa marsada berada di dekat RSU Kecamatan Sipirok ( Rumah Sakit Umum, maka dari itu pemerintah desa tidak menyediakan sarana kesehatan di desa marsada. Keadaan Poskedes sebelum adanya dana desa dan sesudah adanya dana desa tidak mengalami perubahan karena memang dari awal pembangunan sarana kesehatan di desa tersebut sudah bagus, maka dari itu tidak ada perubahan dari sisi pembangunan. Dilihat dari kantor desa dari ke empat desa tersebut juga tidak mengalami perubahan sama dengan sarana kesehatan sebelumnya tetapi mungkin perubahannya hanya dari segi warna kantor desa.

**Grafik 4.9**

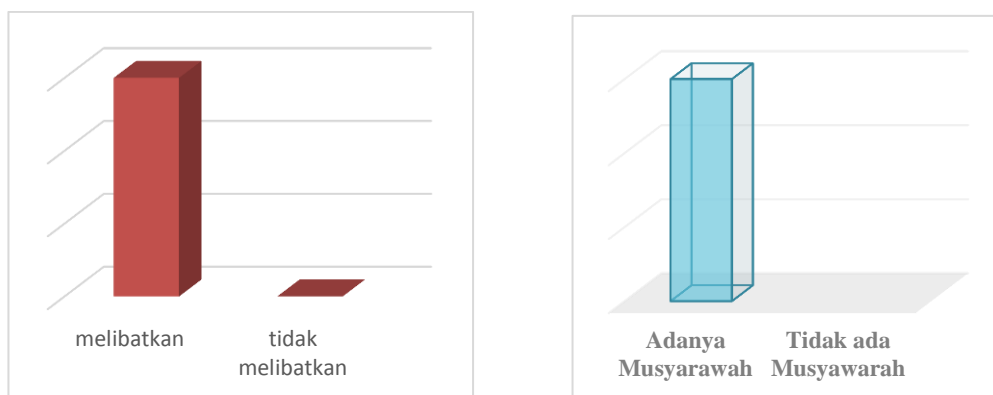
**Mengetahui atau Tidak Mengetahui Dana Desa dan Bumdes**



Dilihat dari Dana Desa dan Bumdes ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai Dana Desa dan Bumdes tersebut maka dari itu pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai Dana Desa dan Bumdes kepada masyarakat desa dengan cara pemerintahan desa mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi tersebut agar masyarakat desa tersebut lebih mengetahui tentang Dana Desa dan Bumdes.

**Grafik 4.10**

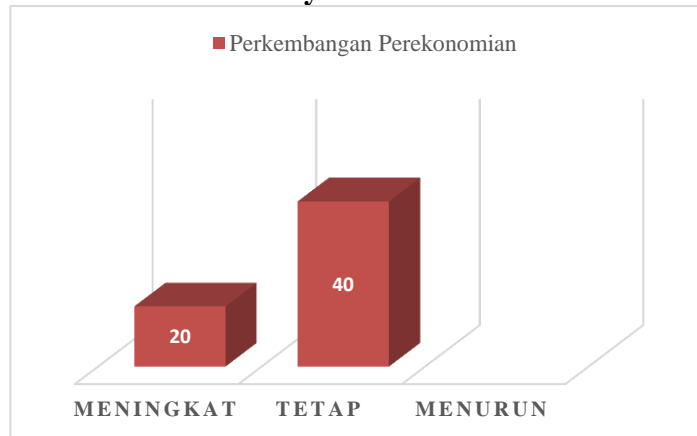
**Melibatkan dan Musyawarah Mengenai Pengelolaan Dana Desa**



Di dalam pengelolaan Dana Desa di desa paranjulu, desa marsada, desa sarogodung, desa paranpadang pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa seperti perbaikan infrastruktur yang ada di desa,

menjalankan usaha Bumdes yang ada di desa tersebut dan juga pemerintah desa melaksanakan musyawarah bersama masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa tersebut.

**Grafik 4.11**  
**Perkembangan Perekonomian Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa**



Dari data responden yang di ambil dari 4 desa di atas dapat dilihat bahwa perkembangan perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa sebagian meningkat dan ada juga yang tetap. Tetapi dari 60 responden tersebut ada 20 responden atau 20% yang menyatakan bahwa adanya peningkatan perekonomian ketika adanya dana desa, dan ada 40 responden atau 40% yang menyatakan bahwa perekonomian mereka tetap walaupun sebelum adanya dana desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi model regresi variabel JPD (jumlah penduduk desa), JSFS (jumlah sarana fisik sekolah), JSFKES (jumlah sarana fisik kesehatan), TK (tingkat kemiskinan), IPD (indeks pembangunan desa) berpengaruh sebesar 42,52% sedangkan sisanya 57,48 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*.
2. Dari hasil test diagnostic menyimpulkan variabel Jumlah Penduduk Desa

(JPD) dengan hasil prob 0.2122 dengan taraf signifikan di atas 15% , variabel Jumlah Sarana Fisik Sekolah (JSFS) nilai prob 0.6394 taraf signifikan di atas 15%, kemudian variabel Jumlah Sarana Fisik Kesehatan (JSFKES) dengan nilai prob 0.0089 dengan taraf 5%, Jumlah Desa (JD) dengan nilai prob 0.0001 dengan taraf signifikan 1%, Variabel Tingkat Kemiskinan (TK) dengan taraf signifikan 5% dengan nilai prob 0.0033 dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan taraf signifikan 1% dengan nilai prob 0.0002. Secara parsial maka dapat disimpulkan Bahwa JD (jumlah desa) berpengaruh kuat terhadap variabel terikat Dana Desa (DD).

3. Pada potensi ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari nilai dan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2015 dan 2019. Dapat dilihat pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.3 608,68 dengan kontribusi 45,62 persen , mengalami peningkatan menjadi Rp. 4 273,11 di tahun 2019 dan memiliki kontribusi 44,13. Sedangkan sektor yang paling rendah di tahun 2015 dan 2019 adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 4,66 dengan kontribusi 0,06 persen dan Rp. 6,16 di tahun 2019 dan memiliki kontribusi sebesar 0,06 persen. Pada PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2010 pada periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil, tahun 2019 PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 34,35 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tumbuh sebesar 4,11 persen dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,62 persen. Pada kontribusi tenaga

kerja menurut lapangan pekerjaan yang penyerapan tenaga kerja yang terbesar yaitu di tahun 2019 sebesar 32,24% dan yang terkecil yaitu di tahun 2018 sebesar 14,37% tenaga kerja. Dan dilihat dari Dana Desa Dana yaitu Dana Desa yang paling besar di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 167.761.279 juta Dana Desa yang terendah pada Kabupaten Tapanuli Selatan di yaitu pada tahun 2015 sebesar 16.507.826 juta.

4. Pengelolaan Dana Desa yang di terapkan oleh pemerintah desa kecamatan Sipirok sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses penglolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dan Desa dilakukan sangat baik tetapi belum juga bisa mengurangi besarnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Sipirok.
5. Proporsi pembagian Dana Desa tepat dan berjalan lancar dalam membangun peremonomian desa, hal itu di buktikan dengan pembentukan BUMDes yang melibatkan masyarakat desa dengan beberapa usaha seperti penanaman cabe, penanaman kopi, pengelolaan pupuk dan pengelolaan wisata desa. Keempat desa tersebut memiliki beberapa infrastruktur setelah adanya dana desa seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, pembangunan pengolahan air bersih, pembangunan jembatan untuk akses kendaraan ke kebun atau sawah. Perekonomian masyarakat sebelum adanya Dana Desa ataupun setelah adanya dana desa tidak mengalami peningkatan artinya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah tidak

begitu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dilihat dari kondisi sosial di desa tersebut bahwa ada satu desa yang tidak memiliki pos kesehatan desa dikarenakan di desa tersebut berdekatan dengan rumah sakit umum Kecamatan Sipirok.

## **5.2 Saran**

1. Indeks Pembangunan Manusia meskipun tidak satu-satunya variabel ataupun sektor yang mendukung Pembangunan Desa, tetapi apabila IPM berada dalam keadaan tingkat yang tinggi maka akan memberikan dampak yang positif juga pada pembangunan desa, daerah maupun nasional. Pemerintah harus meningkatkan Aksesibilitas di daerah terpencil baik desa ataupun kabupaten agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Indeks Pembangunan Desa tidak hanya diukur oleh IPM saja tetapi dapat diukur melalui Anggaran Dana Desa, PDRB Perkapita dan Jumlah Penduduk, variabel tersebut untuk mengukur IPD di Kabupaten. Apabila laju IPD yang tinggi menunjukkan bahwasanya tingkat kualitas sumber daya masyarakat semakin meningkat. Sehingga dengan tingkat kualitas masyarakat yang besar maka secara langsung ataupun tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. sehingga diperlukannya kebijakan agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia meningkat.
3. Masyarakat yang kurang mengerti tentang Dana Desa dan Bumdes seharusnya di berikan sosialisasi yang lebih agar mengerti dan juga harus di tunjang dengan adanya fasilitas informasi tentang dana desa, tidak hanya di kantor desa saja melainkan di seluruh sudut pedesaan agar



masyarakat desa mengetahui tentang Dana Desa.

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program - program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7, halaman 1-34.*
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa, 2-16.*
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 5, Nomor 2.*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.* [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Angka 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka. 2020.
- Budianta, A. (2010). Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek, Volume 8, 72-82.*
- Deining, K. , Dan Pedro, O. (2000). Asset Distribution, Inequality, and Growth. *The World Bank, 5-9.*

- Ginting, C., Lubis, I. & Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Volume 5*.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrik dasar*. Jakarta: Erlanga.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten). *Institut Pertanian Bogor, 11*.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemendesa. (2019). *Data Perkembangan Pembangunan Desa Menurut status IDM*. <https://idm.kemendesa.go.id>.
- Kemendesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi*. <https://idm.kemendesa.go.id>
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Dana Desa per Pulau di Indonesia tahun 2017*. <http://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2020*. <http://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlanga.
- Kuncoro, Mudrajat. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlanga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Volume 5, 1-19*.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mankiw, G.N. (2007). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlanga.
- Musgrave, Richard A & Peggy Musgrave. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*. New York. McGraw-Hill Inc.
- Rapanna, P., & Fajriah, Y. (2018). *Melawan Badai Ekonomi Dalam Perspektif kearifan lokal*. Makassar: CV. Sah Media.
- Rochjadi, A. (2004). *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Inter Governmental Fiscal Review*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8, 357*.
- Suyanto. (2009). Studi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (*a study on the policy of decentralization in Indonesia*). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, Volume 1, 66-81*.

Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlanga.

## LAMPIRAN

### *Regresi Berganda Model*

Dependent Variable: DD  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/04/21 Time: 19:17  
 Sample (adjusted): 2014 2018  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 25  
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.16E+08	1.79E+08	-3.999060	0.0002
JPD	65.60375	51.80624	1.266329	0.2122
JSFS	-95907.93	203272.5	-0.471820	0.6394
JSFKES	-742660.8	271169.7	-2.738730	0.0089
JD	963199.7	222960.7	4.320043	0.0001
TK	8980153.	2881463.	3.116526	0.0033
IPD	10560691	2619227.	4.031987	0.0002
R-squared	0.495650	Mean dependent var		82760954
Adjusted R-squared	0.425275	S.D. dependent var		86214502
S.E. of regression	65359740	Akaike info criterion		38.95789
Sum squared resid	1.84E+17	Schwarz criterion		39.22557
Log likelihood	-966.9472	Hannan-Quinn criter.		39.05982
F-statistic	7.043031	Durbin-Watson stat		2.817466
Prob(F-statistic)	0.000029			

## *Random Effect Model*

Dependent Variable: DD  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/04/21 Time: 19:18  
 Sample (adjusted): 2014 2018  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 25  
 Total panel (balanced) observations: 50  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.16E+08	1.24E+08	-5.766243	0.0000
JPD	65.60375	35.92917	1.825919	0.0748
JSFS	-95907.93	140975.5	-0.680316	0.5000
JSFKES	-742660.8	188064.2	-3.948974	0.0003
JD	963199.7	154629.8	6.229068	0.0000
TK	8980153.	1998380.	4.493717	0.0001
IPD	10560691	1816512.	5.813720	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		45328918	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.495650	Mean dependent var	82760954
Adjusted R-squared	0.425275	S.D. dependent var	86214502
S.E. of regression	65359740	Sum squared resid	1.84E+17
F-statistic	7.043031	Durbin-Watson stat	2.817466
Prob(F-statistic)	0.000029		



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 165/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/18/1/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 18/1/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Henni Putri Siregar  
NPM : 1705180026  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Bumdes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes yang kegiatannya bergerak pada penyediaan pupuk bagi masyarakat desa karena dinilai sangat efektif melihat perekonomian masyarakat yang masih bisa dikatakan rendah.  
2. Efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur, dan mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan dana desa yang lokasinya jauh dari perkotaan.  
3. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah bagi kabupaten tapanuli selatan, beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah karakteristik rumah tangga miskin di kabupaten tapanuli selatan.
- Rencana Judul : 1. Pengembangan potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Di Desa Patanjulu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
2. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan infrastruktur Pedesaan Di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
3. Analisis Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Tapanuli Selatan
- Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Henni Putri Siregar)




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 165/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/18/1/2021

Nama Mahasiswa : Henni Putri Siregar  
NPM : 1705180026  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis  
Tanggal Pengajuan Judul : 18/1/2021  
Nama Dosen pembimbing? : Pradiya H RS  
Judul\*\*): Analisis Evaluasi Kebijakan  
Dana Desa Pada Provinsi  
Sumatera Utara .

Disahkan oleh: Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
  
(Dr. Pradiya Hariani RS., SE., M.Si.)  
Medan, .....  
Dosen Pembimbing  
(.....)

Keterangan  
\*) Data oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Data oleh Dosen Pembimbing  
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ini ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapl. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada hari ini Selasa, 23 Maret 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Henni Putri Siregar  
N.P.M. : 1705180026  
Tempat / Tgl.Lahir : Padangsidempuan, 17 Juli 1998  
Alamat Rumah : Jalan Setia Budi Gg Anyelir IV no. 5F Medan  
Judul/Proposal : Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara
Bab I	Tambah kondisi: Tapsel sesuai dengan rumus masalah.
Bab II	- Tambah Hipotesis, Diagram Kerangka & Survei Pend. Lokal
Bab III	Perfeksi Def. operasional, Model & Formula
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Selasa, 23 Maret 2021

**TIM SEMINAR**

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 23 Maret 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Henni Putri Siregar  
N .P.M. : 1705180026  
Tempat / Tgl.Lahir : Padangsidempuan, 17 Juli 1998  
Alamat Rumah : Jalan Setia Budi Gg Anyelir IV no. 5F Medan  
JudulProposal : Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si**

Medan, **Selasa 23 Maret 2021**

**TIM SEMINAR**

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HENNI PUTRI SIREGAR  
N.P.M : 1705180026  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
24 Juni 2021	Bab IV No di awal dan komponen (bagi) Pd. Ekonomi, Susuikan dgn matriks yg ada, tambahkan di latar belakang Mencari tabel.		
29 Juni 2021	Lanjutan lagi Bab IV yg analisis Data Susuikan dgn Tujuan Pembinaan PBL yang akan ada analisis Glossary.		
28 Juli 2021	Bab IV, ada ada pembahasan → liter lgi di Bab III yg Mengetahui agar Susunan dgn tujuan. rescan.		
4 Agustus 2021	Bab IV Menda hol analisis yang Simpulan yg diambil dan kelayakan di berikan saran.		
9/8-21	Revisi soal yang all bab smp' yg di lanjut		

Medan, 9 Agustus 2021  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si